

DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG)



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BLITAR 2023**

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. Permendagri 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

Penyusunan dokumen PPRG ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan dan Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor: SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan.

Perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan permasalahan dan pengalaman perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan.

Perencanaan Responsif Gender diharapkan dapat menghasilkan Anggaran Responsif Gender (ARG), di mana kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki.

Pada Tahun 2023 ada 3 (tiga) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 48 (empat puluh delapan) subkegiatan di Sekretariat Daerah sebagaimana dijelaskan di tabel 1, dimana Rencana program, kegiatan dan subkegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 berpedoman dan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Untuk ARG disampaikan 10 (sepuluh) subkegiatan.

**Tabel 1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan di Sekretariat Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2023**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PELAKSANA
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	
1.1	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bagian Perencanaan dan Keuangan
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bagian Umum
1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
1.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	
1.3.5	Fasilitas Kunjungan Tamu	
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
1.3.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
1.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
1.5.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
1.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PELAKSANA
1.6	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Bagian Umum
1.6.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
1.6.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
1.6.3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	
1.7	Kegiatan Penataan Organisasi	Bagian Organisasi
1.7.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
1.7.2	Fasilitas Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	
1.7.3	Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	
1.8	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
1.8.1	Fasilitas Keprotokolan	
1.8.2	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	
1.8.3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	
II.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
2.1	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan
2.1.1	Penataan Administrasi Pemerintah	
2.1.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
2.1.3	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	
2.2	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	
2.2.1	Fasilitas Kerja sama Dalam Negeri	
2.2.2	Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	
2.2.3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	
2.3	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra
2.3.1	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
2.3.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	
2.3.3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	
2.4	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Bagian Hukum
2.4.1	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	
2.4.2	Fasilitas Bantuan Hukum	
2.4.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PELAKSANA
III.	Program Perekonomian dan Pembangunan	
3.1	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Bagian Perekonomian
3.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Dan BLUD	
3.1.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
3.1.3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	
3.2	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan
3.2.1	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
3.2.2	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
3.3	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
3.3.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
3.3.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
3.3.3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
3.4	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Bagian Perekonomian
3.4.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	
3.4.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	
3.4.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	

ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 119.529.600
2	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 1.770.536.500
3	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp 475.569.000
4	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan	Rp 267.989.380
5	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp 161.972.200
6	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp 1.001.682.237
7	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp 488.326.750
8	Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp 583.878.000
9	Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 423.538.000
10	Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp 159.599.000
JUMLAH ARG				Rp 5.452.620.667

Blitar, 23 Pebruari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLITAR



Dr. IZUL MAROM, M.Sc.



Lampiran 1	Lampiran 2	Lampiran 3	Lampiran 4	Lampiran 5	Lampiran 6	Lampiran 7	Lampiran 8	Lampiran 9
No	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60	61	62	63
64	65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80	81
82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99
100	101	102	103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114	115	116	117
118	119	120	121	122	123	124	125	126
127	128	129	130	131	132	133	134	135
136	137	138	139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150	151	152	153
154	155	156	157	158	159	160	161	162
163	164	165	166	167	168	169	170	171
172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189
190	191	192	193	194	195	196	197	198
199	200	201	202	203	204	205	206	207
208	209	210	211	212	213	214	215	216
217	218	219	220	221	222	223	224	225
226	227	228	229	230	231	232	233	234
235	236	237	238	239	240	241	242	243
244	245	246	247	248	249	250	251	252
253	254	255	256	257	258	259	260	261
262	263	264	265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276	277	278	279
280	281	282	283	284	285	286	287	288
289	290	291	292	293	294	295	296	297
298	299	300	301	302	303	304	305	306
307	308	309	310	311	312	313	314	315
316	317	318	319	320	321	322	323	324
325	326	327	328	329	330	331	332	333
334	335	336	337	338	339	340	341	342
343	344	345	346	347	348	349	350	351
352	353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368	369
370	371	372	373	374	375	376	377	378
379	380	381	382	383	384	385	386	387
388	389	390	391	392	393	394	395	396
397	398	399	400	401	402	403	404	405
406	407	408	409	410	411	412	413	414
415	416	417	418	419	420	421	422	423
424	425	426	427	428	429	430	431	432
433	434	435	436	437	438	439	440	441
442	443	444	445	446	447	448	449	450
451	452	453	454	455	456	457	458	459
460	461	462	463	464	465	466	467	468
469	470	471	472	473	474	475	476	477
478	479	480	481	482	483	484	485	486
487	488	489	490	491	492	493	494	495
496	497	498	499	500	501	502	503	504
505	506	507	508	509	510	511	512	513
514	515	516	517	518	519	520	521	522
523	524	525	526	527	528	529	530	531
532	533	534	535	536	537	538	539	540
541	542	543	544	545	546	547	548	549
550	551	552	553	554	555	556	557	558
559	560	561	562	563	564	565	566	567
568	569	570	571	572	573	574	575	576
577	578	579	580	581	582	583	584	585
586	587	588	589	590	591	592	593	594
595	596	597	598	599	600	601	602	603
604	605	606	607	608	609	610	611	612
613	614	615	616	617	618	619	620	621
622	623	624	625	626	627	628	629	630
631	632	633	634	635	636	637	638	639
640	641	642	643	644	645	646	647	648
649	650	651	652	653	654	655	656	657
658	659	660	661	662	663	664	665	666
667	668	669	670	671	672	673	674	675
676	677	678	679	680	681	682	683	684
685	686	687	688	689	690	691	692	693
694	695	696	697	698	699	700	701	702
703	704	705	706	707	708	709	710	711
712	713	714	715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726	727	728	729
730	731	732	733	734	735	736	737	738
739	740	741	742	743	744	745	746	747
748	749	750	751	752	753	754	755	756
757	758	759	760	761	762	763	764	765
766	767	768	769	770	771	772	773	774
775	776	777	778	779	780	781	782	783
784	785	786	787	788	789	790	791	792
793	794	795	796	797	798	799	800	801
802	803	804	805	806	807	808	809	810
811	812	813	814	815	816	817	818	819
820	821	822	823	824	825	826	827	828
829	830	831	832	833	834	835	836	837
838	839	840	841	842	843	844	845	846
847	848	849	850	851	852	853	854	855
856	857	858	859	860	861	862	863	864
865	866	867	868	869	870	871	872	873
874	875	876	877	878	879	880	881	882
883	884	885	886	887	888	889	890	891
892	893	894	895	896	897	898	899	900
901	902	903	904	905	906	907	908	909
910	911	912	913	914	915	916	917	918
919	920	921	922	923	924	925	926	927
928	929	930	931	932	933	934	935	936
937	938	939	940	941	942	943	944	945
946	947	948	949	950	951	952	953	954
955	956	957	958	959	960	961	962	963
964	965	966	967	968	969	970	971	972
973	974	975	976	977	978	979	980	981
982	983	984	985	986	987	988	989	990
991	992	993	994	995	996	997	998	999
1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN ANGGARAN 2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**

No.	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
			Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan Subkegiatan	Rencana Aksi	Database (Base-line)	Indikator Kinerja
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<p>Visi Bupati Blitar: Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Baladun, Thoyyibatun, Warobbun Ghoffur)</p> <p>2. Mendukung Misi 3 RPJMD: Pengoptimalan Kinerja Pemerintah Yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas</p> <p>3. Kebijakan: Meningkatnya kinerja Penyelenggara urusan bidang koordinasi bidang administrasi</p> <p>4. Program: Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</p>	<p>1. Dasar Hukum: - Perda No.2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab. Blitar 2021-2026 - Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan</p>	<p>Akses: Belum semua bagian menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender</p> <p>Partisipasi: Lebih kecilnya partisipasi perempuan dalam perencanaan</p> <p>Kontrol: Pengambilan keputusan masih didominasi laki-laki</p>	Belum adanya kesempatan bagi perempuan dalam perencanaan	Belum semua dilibatkan dalam proses penyusunan perencanaan yang responsif gender	Tersusunnya dokumen LKJIP, RENJA, RKA, DPA, KA-P, DPPA dan terfasilitasinya SAKIP dan Reformasi Birokrasi Setda yang responsif gender	Pendampingan penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender	1 dokumen yang disusun dengan melibatkan semua perencana di seluruh Bagian Sekretariat Daerah	<p>Outcome: (Indikator Program) Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah (100%)</p> <p>Output: (Indikator Kegiatan) Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan (100%)</p> <p>Output: (Indikator Sub Kegiatan) Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan</p>

No.	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
			Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan Subkegiatan	Rencana Aksi	Database (Base-line)	Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5.	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembangunan dan Keuangan Daerah	Manfaat: Belum semua manfaat dari perencanaan dirasakan perempuan						evaluasi kinerja perangkat daerah (9 dokumen) Indikator Kinerja Aktifitas: Tersusunnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender
6.	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2. Dokumen yang disusun merupakan data dari 10 Bagian di Sekretariat Daerah							
7.	Tujuan: Tersusunnya dokumen LKJIP, RENJA, RKA, DPA, KA-P, DPPA dan terfasilitasinya SAKIP dan Reformasi Birokrasi Setda	3. Komposisi perencana pada Bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar lebih banyak laki-laki daripada perempuan, perbandingan 6:4							
8.	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen Perangkat Daerah yang disusun								

**GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) TA. 2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

PERANGKAT DAERAH	Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
TAHUN ANGGARAN	2023
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ TUJUAN SUBKEGIATAN/ INDIKATOR/ SASARAN	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Tujuan : Tersusunnya dokumen LKJIP, RENJA, RKA, DPA, KA-P, DPPA dan terfasilitasinya SAKIP dan Reformasi Birokrasi Setda
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen Perangkat Daerah yang disusun
	Sasaran : Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
KODE SUB KEGIATAN	4.01.01.2.01.001
ANALISIS SITUASI	<p>Data Pembuka Wawasan: Dasar Hukum: 1. Perda No.2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab.Blitar 2021-2026 2. Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah</p> <p>Dokumen yang disusun merupakan data dari 10 Bagian di Sekretariat Daerah</p> <p>Komposisi perencana pada Bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar lebih banyak laki-laki daripada perempuan, perbandingan 6:4</p> <p>Faktor Kesenjangan Gender: 1. Akses: Belum semua bagian menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender 2. Partisipasi: Lebih kecilnya partisipasi perempuan dalam perencanaan 3. Kontrol; Pengambilan keputusan masih didominasi laki-laki 4. Manfaat: Belum semua manfaat dari perencanaan dirasakan perempuan</p>

<p>PROGRAM TAHUNAN</p> <p>2023</p>	<p>Sebab Kesenjangan Gender:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internal: Belum adanya kesempatan bagi perempuan dalam perencanaan • Eksternal: Belum semua dilibatkan dalam proses penyusunan perencanaan yang responsif gender 	
<p>CAPAIAN SUB KEGIATAN</p>	<p>Tolak Ukur : Tujuan Subkegiatan yang telah direformasi Tersusunnya dokumen LKJIP, RENJA, RKA, DPA, KA-P, DPPA dan terfasilitasinya SAKIP dan Reformasi Birokrasi Setda yang responsif gender</p>	
	<p>Indikator dan Target Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Output Subkegiatan: Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah (9 dokumen) • Outcome Subkegiatan: Tersusunnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 	
<p>JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN</p>	<p>Rp 119.529.600</p>	
<p>RENCANA AKSI</p>	<p>Aktivitas Seksi</p>	<p>Pendampingan penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender</p>
	<p>Masukan/ Input</p>	<p>Rp. 6.000.000</p>
	<p>Keluaran/ Ouput</p>	<p>Tersedianya dokumen LKJIP, RENJA, RKA, DPA, KA-P, DPPA dan terfasilitasinya SAKIP dan Reformasi Birokrasi Setdayang responsif gender</p>
	<p>Hasil/ Outcome</p>	<p>10 Bagian di Sekretariat Daerah telah menyusun dokumen LKJIP, RENJA, RKA, DPA, KA-P, DPPA dan memberikan kontribusi dalam penyusunan SAKIP dan Reformasi Birokrasi Setda yang responsif gender</p>

TERM OF REFERENCE (TOR) APBD TA. 2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Nama OPD : Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
 Tahun : 2023

1.	PROGRAM		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.	SASARAN PROGRAM		Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
3.	KEGIATAN		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.	SUB KEGIATAN		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.	LATAR BELAKANG	DASAR HUKUM	1. Perda No. 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab Blitar Tahun 2021-2026 2. Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
		GAMBARAN UMUM	Dokumen yang disusun merupakan data dari 10 Bagian di Sekretariat Daerah Komposisi perencana pada Bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar lebih banyak laki-laki daripada perempuan, perbandingan 6:4 Akses : Belum semua bagian menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender Partisipasi : Lebih kecilnya partisipasi perempuan dalam perencanaan Kontrol : Pengambilan keputusan masih didominasi laki-laki Manfaat : Belum semua manfaat dari perencanaan dirasakan perempuan
6.	AKTIVITAS	URAIAN AKTIVITAS	1. Penyusunan dokumen LKJIP, RENJA, RKA, DPA, KA-P, DPPA 2. Kecukupan data dari masing-masing bagian terkait dengan penilaian evaluasi SAKIP dari Kementerian PAN & RB 3. Kecukupan kertas kerja evaluasi RB Sekretariat daerah oleh Kementerian PAN & RB

		INDIKATOR KINERJA	Indikator Subkegiatan: Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah (9 dokumen) Target kinerja: Jumlah 9 dokumen
		BATASAN SUB KEGIATAN	FGD, Pendampingan
7.	MAKSUD DAN TUJUAN		Tersusunnya dokumen LKJIP, RENJA, RKA, DPA, RKA-P, DPPA dan terfasilitasinya SAKIP dan Reformasi Birokrasi Setda yang responsif gender
8.	CARA PELAKSANAAN SUBKEGIATAN		Swakelola
9.	WAKTU, TEMPAT PELAKSANAAN DAN STRATEGI INTEGRASI GENDER PER AKTIVITAS		Pendampingan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Integrasi Gender : Undangan peserta penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender mempertimbangkan keseimbangan gender Anggaran : Rp. 6.000.000 Tempat : Ruang Rapat Candi Penataran Kantor Sekretariat Daerah Kab. Blitar Waktu : Triwulan I Peserta : Sungram Pembantu 10 bagian di Sekretariat Daerah Pelaksana : Bagian Perencanaan dan Keuangan Aktivitas Pendukung : Rp 110.529.600
10.	PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUBKEGIATAN		Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
11.	JADWAL		Januari - Desember 2023
12.	BIAYA		Rp 119.529.600

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN ANGGARAN 2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

No.	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
			Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
1.	Visi Bupati Blitar: Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Baldatun, Thoyyibatun, Warobbun Ghoffur)	1. Dasar Hukum: - Perda No.2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab. Blitar 2021-2026 - Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	Akses : Gedung kantor belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh pejabat daerah, karyawan dan masyarakat. Partisipasi : Perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak dan lansia belum dapat memanfaatkan gedung kantor. Kontrol : Terbatasnya pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan.	Pengelolaan kegiatan belum responsif gender terhadap kebutuhan fasilitas kerja yang layak bagi karyawan laki-laki dan perempuan: - Masih terdapat toilet gedung kantor yang mempunyai 1 pintu utama, meskipun sudah terpisah antara toilet laki-laki dan perempuan. - Fasilitas tempat ibadah yang belum memenuhi standar kebutuhan laki-laki dan perempuan. - Belum tersedianya <i>smoking area</i> .	- Belum adanya aturan dari pusat yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan responsif gender kantor. - Pengalokasian penambahan ruangan responsif gender belum ada - Kurangnya pemahaman masing-masing sub bagian terhadap keterkaitan tugas dan fungsinya dengan	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan dan gedung kantor yang responsif gender sehingga tercipta lingkungan kerja yang bersih dan nyaman bagi karyawan untuk meningkatkan kinerja.	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor: 1. Pemeliharaan lift bangunan gedung kantor 2. Kamar Mandi Playground Sisi Barat dan Timur yang sering digunakan masyarakat laki-laki, perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak dan lansia. 3. Pemeliharaan dan perawatan gedung kantor (<i>cleaning service</i> ruang Pimpinan daerah, toilet laki-laki dan perempuan) 4. Pemeliharaan	1. Pemeliharaan lift bangunan gedung kantor, yang digunakan laki-laki 164 Perempuan 78. 2. Pemeliharaan Kamar Mandi Playground Sisi Barat dan Timur 3. Pemeliharaan dan perawatan gedung kantor (<i>cleaning service</i> ruang Pimpinan daerah, toilet laki-laki dan perempuan)	Outcome (Indikator Program): Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota: 100% Output (Indikator Kegiatan): Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik: 100% Output (Indikator Subkegiatan): Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
2.	Mendukung Misi 3 RPJMD: Pengoptimalan Kinerja Pemerintah Yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas								
3.	Kebijakan: Meningkatnya kinerja Penyelenggara urusan bidang koordinasi bidang administrasi								
4.	Kebijakan: Meningkatnya kinerja penyelenggara urusan lingkup koordinasi bidang administrasi								



5.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2. Jumlah semua karyawan (Pejabat eselon 4, staf ASN dan THL) Setda: 172 orang ,dengan rincian: Laki-laki: 101 orang, Perempuan: 71 orang.	disabilitas dan lansia.	- Rendahnya kesadaran pengguna fasilitas gedung kantor dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan kerja.	program yang responsif gender.	Rumdin Sekda dan wisma Muradi	4. Pemeliharaan Gedung atau Bangunan (Gedung tidak bertingkat) Pemeliharaan Rumdin Sekda dan wisma Muradi	Indikator Kinerja Aktifitas: Terpeliharanya lift bangunan gedung kantor.
6.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3. Dari jumlah Pimpinan Daerah, Kepala OPD, Camat dan karyawan Setda tersebut yang berusia: >50 : 45 orang, <50 : 197 orang.						
7.	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4. Kunjungan tamu dan masyarakat termasuk perempuan, disabilitas, anak-anak dan lansia yang datang ke kantor Setda. Jumlah kunjungan ke kantor Sekda: Laki-laki: 501 orang, Perempuan: 110 orang, Lansia: 4 orang, Disabilitas: - orang.						
8.	Tujuan Sub Kegiatan: Terpeliharanya gedung kantor atau bangunan lainnya							
9.	Sasaran: Pejabat Daerah (KDH/WKDH, Kepala OPD dan Camat se-Kab. Blitar), Semua karyawan Sekretariat Daerah, Masyarakat							

**GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) TA. 2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

PERANGKAT DAERAH	Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
TAHUN ANGGARAN	2023
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ TUJUAN SUBKEGIATAN/ INDIKATOR/ SASARAN	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Tujuan : Terpeliharanya gedung kantor atau bangunan lainnya
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
	Sasaran : Pejabat Daerah (KDH/WKDH, Kepala OPD dan Camat se-Kab. Blitar), Semua karyawan Sekretariat Daerah, dan Masyarakat
KODE SUB KEGIATAN	4.01.01.2.09.09
ANALISIS SITUASI	<p>Data Pembuka Wawasan: Dasar Hukum: 1. Perda No.2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab.Blitar 2021-2026 2. Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah</p> <p>1 Kepala Daerah (Perempuan) dan 1 Wakil Kepala Daerah (Laki-laki)</p> <p>Pejabat Daerah se-Kab. Blitar, terdiri: 1 Sekda, 3 Asisten, 3 Staf Ahli, 29 Kepala OPD, 22 Camat, 10 Kepala Bagian) dengan rincian Laki-laki 62 orang dan Perempuan 6 orang.</p> <p>Jumlah semua karyawan (Pejabat eselon 4, staf ASN dan THL) Setda: 172 orang , dengan rincian: Laki-laki: 101 orang, Perempuan: 72 orang.</p> <p>Dari jumlah Pimpinan Daerah, Kepala OPD, Camat dan karyawan Setda tersebut yang berusia: >50 : 45 orang, <50 : 197 orang.</p> <p>Kunjungan tamu dan masyarakat termasuk perempuan, disabilitas, anak-anak dan lansia yang datang ke kantor Setda.</p> <p>Jumlah kunjungan ke kantor Sekda: Laki-laki: 501 orang, Perempuan: 110 orang, Lansia: 4 orang, Disabilitas: - orang.</p>

	<p>Faktor Kesenjangan Gender:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akses: Gedung kantor belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh pejabat daerah, karya wan dan masyarakat. 2. Partisipasi: Perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak dan lansia belum dapat me manfaatkan gedung kantor. 3. Kontrol: Terbatasnya pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. 4. Manfaat: Penggunaan fasilitas gedung kantor masih belum dapat dimanfaatkan oleh kaum disabilitas dan lansia. <p>Sebab Kesenjangan Gender:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internal: <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan kegiatan belum responsif gender terhadap kebutuhan fasilitas kerja yang layak bagi karyawan laki-laki dan perempuan: <ul style="list-style-type: none"> - Masih terdapat toilet gedung kantor yang mempunyai 1 pintu utama, meskipun sudah terpisah antara toilet laki-laki dan perempuan. - Fasilitas tempat ibadah yang belum memenuhi standar kebutuhan laki-laki dan perempuan. - Belum tersedianya <i>smoking area</i>. - Rendahnya kesadaran pengguna fasilitas gedung kantor dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan kerja. • Eksternal: <ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya aturan dari pusat yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan responsif gender kantor. - Pengalokasian penambahan ruangan responsif gender belum ada. - Kurangnya pemahaman masing-masing sub bagian terhadap keterkaitan tugas dan fungsinya dengan program yang responsif gender 	
CAPAIAN SUB KEGIATAN	<p>Tolak Ukur : Tujuan Subkegiatan yang telah direformasi Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan dan gedung kantor yang responsif gender sehingga tercipta lingkungan kerja yang bersih dan nyaman bagi karyawan untuk meningkatkan kinerja.</p> <p>Indikator dan Target Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Output Subkegiatan: Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi • Outcome Subkegiatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Terpeliharanya lift bangunan gedung kantor 2. Terpeliharanya Kamar Mandi Playground Sisi Barat dan Timur 3. Terpeliharanya bangunan gedung kantor (cleaning service ruang Pimpinan daerah, toilet laki-laki dan perempuan) 4. Terpeliharanya rumah jabatan (Rumah dinas Sekda dan Wisma Muradi). 	
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN	Rp 1.770.536.500	
RENCANA AKSI	Aktivitas Seksi	1. Pemeliharaan Lift Bangunan Gedung Kantor
	Masukan/ Input	Rp 54.330.000
	Keluaran/ Ouput	Terpeliharanya lift bangunan gedung kantor

	Hasil/ Outcome	Gedung kantor yang terpelihara dengan baik
	Aktivitas Seksi	2. Pemeliharaan Kamar Mandi Playground Sisi Barat dan Timur
	Masukan/ Input	Rp 100.000.000
	Keluaran/ Ouput	Terpeliharanya Kamar Mandi Playground Sisi Barat dan Timur
	Hasil/ Outcome	Kamar Mandi Playground Sisi Barat dan Timur yang terpelihara dengan baik
	Aktivitas Seksi	3. Pemeliharaan Gedung atau Bangunan (Gedung Tidak Bertingkat) <i>Cleaning Service</i> Sekda
	Masukan/ Input	Rp 199.724.000
	Keluaran/ Ouput	Terpeliharanya bangunan gedung kantor (<i>cleaning service</i> ruang Pimpinan daerah, toilet laki-laki dan perempuan)
	Hasil/ Outcome	Gedung kantor yang terpelihara dengan baik.
	Aktivitas Seksi	4. Pemeliharaan Gedung atau Bangunan (Gedung Tidak Bertingkat) Pemeliharaan Rumdin Sekda dan Wisma Muradi
	Masukan/ Input	Rp.49.980.000,-
	Keluaran/ Ouput	Terpeliharanya rumah jabatan (Rumah dinas Sekda dan Wisma Muradi).
	Hasil/ Outcome	Rumah jabatan (Rumdin Sekda dan Wisma Muradi) yang terpelihara dengan baik.

TERM OF REFERENCE (TOR) APBD TA. 2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Nama OPD : Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
Tahun : 2023

1.	PROGRAM		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.	SASARAN PROGRAM		Tingkat capaian kinerja kegiatan pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3.	KEGIATAN		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.	SUB KEGIATAN		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.	LATAR BELAKANG	DASAR HUKUM	<p>1. Perda No. 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab Blitar Tahun 2021-2026</p> <p>2. Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah</p>
		GAMBARAN UMUM	<p>1 Kepala Daerah (Perempuan) dan 1 Wakil Kepala Daerah (Laki-laki)</p> <p>Pejabat Daerah se-Kab. Blitar, terdiri: 1 Sekda, 3 Asisten, 3 Staf Ahli, 29 Kepala OPD, 22 Camat, 10 Kepala Bagian) dengan perincian Laki-laki 62 orang dan Perempuan 6 orang.</p> <p>Jumlah semua karyawan (Pejabat eselon 4, staf ASN dan THL) Setda: 172 orang , dengan rincian: Laki-laki: 101 orang, Perempuan: 72 orang.</p> <p>Dari jumlah Pimpinan Daerah, Kepala OPD, Camat dan karyawan Setda tersebut yang berusia: >50 : 45 orang, <50 : 197 orang.</p> <p>Kunjungan tamu dan masyarakat termasuk perempuan, disabilitas, anak-anak dan lansia yang datang ke kantor Setda.</p> <p>Jumlah kunjungan ke kantor Sekda: Laki-laki: 501 orang, Perempuan: 110 orang, Lansia: 4 orang, Disabilitas: - orang.</p> <p>Akses: Gedung kantor belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh pejabat daerah, karyawan dan masyarakat.</p>

			<p>Partisipasi: Perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak dan lansia belum dapat memanfaatkan gedung kantor.</p> <p>Kontrol: Terbatasnya pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan.</p> <p>Manfaat: Penggunaan fasilitas gedung kantor masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh kaum disabilitas dan lansia.</p>
6.	AKTIVITAS	URAIAN AKTIVITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan lift bangunan gedung kantor. 2. Pemeliharaan kamar mandi Playground Sisi Barat dan Timur. 3. Pemeliharaan dan perawatan gedung kantor (cleaning service ruang Pimpinan daerah, toilet laki-laki dan perempuan). 4. Pemeliharaan gedung atau bangunan (gedung tidak bertingkat) Pemeliharaan Rumdin Sekda dan Wisma Muradi.
		INDIKATOR KINERJA	<p>Indikator Subkegiatan: Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi</p> <p>Target Kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terpeliharanya lift bangunan gedung kantor 2. Terpeliharanya Kamar Mandi Playground Sisi Barat dan Timur 3. Terpeliharanya bangunan gedung kantor (cleaning service ruang Pimpinan daerah, toilet laki-laki dan perempuan) 4. Terpeliharanya rumah jabatan (Rumah dinas Sekda dan Wisma Muradi).
		BATASAN SUB KEGIATAN	Pengadaan Langsung
7.	MAKSUD DAN TUJUAN		Terpeliharanya rumah jabatan dan gedung kantor yang responsif gender secara berkala
8.	CARA PELAKSANAAN SUBKEGIATAN		Kontrak
9.	WAKTU, TEMPAT PELAKSANAAN DAN STRATEGI INTEGRASI GENDER PER AKTIVITAS		1. Pemeliharaan Lift Bangunan Gedung Kantor
			Integrasi Gender : Ditangani secara kolaborasi
			Anggaran : Rp 54.330.000
			Tempat : Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
			Waktu : Triwulan II
			Pelaksana : Rekanan (Pihak ketiga)

		<p>2. Pemeliharaan Kamar Mandi Playground Sisi Barat dan Timur</p> <p>Integrasi Gender : Ditangani secara kolaborasi</p> <p>Anggaran : Rp 100.000.000</p> <p>Tempat : Playground Barat dan Timur Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar</p> <p>Waktu : Triwulan II</p> <p>Pelaksana : Rekanan (Pihak ketiga)</p> <p>3. Pemeliharaan Gedung atau Bangunan (Gedung Tidak Bertingkat) <i>Cleaning Service</i> Setda</p> <p>Integrasi Gender : Ditangani secara kolaborasi</p> <p>Anggaran : Rp 199.724.000</p> <p>Tempat : Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar</p> <p>Waktu : Triwulan I-IV</p> <p>Pelaksana : Rekanan (Pihak ketiga)</p> <p>4. Pemeliharaan Gedung atau Bangunan (Gedung Tidak Bertingkat) Pemeliharaan Rumdin Sekda dan Wisma Muradi</p> <p>Integrasi Gender : Ditangani secara kolaborasi</p> <p>Anggaran : Rp 49.980.000</p> <p>Tempat : Rumdin Sekda dan Wisma Muradi Kota Blitar</p> <p>Waktu : Triwulan II</p> <p>Pelaksana : Rekanan (Pihak ketiga)</p> <p>Aktivitas Pendukung : Rp 1.366.502.500</p>
10.	PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN	Pelaksana sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar.
11.	JADWAL	Januari - Desember 2023
12.	BIAYA	Rp 1.770.536.500

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN ANGGARAN 2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

No.	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
			Faktor Kesenja ngan	Sebab Kesenja ngan Internal	Sebab Kesenj angan Ekster nal	Reformulasi Tuj uan	Rencana Aksi	Database (Base-line)	Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Visi Bupati Blitar: Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Baldatun, Thoyyibatun, Warobbun Ghoffur)	1. Dasar Hukum: - Perda No.2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab.Blitar 2021-2026 - Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan	Akses: Fasilitasi penyusunan Anjab dan ABK Setda, Setwan, Inspektorat, Badan dan Dinas pada jabatan Sekda, Sekwan, Inspektur, Kaban dan Kadin masih banyak diampu oleh laki-laki Partisipasi: Partisipasi laki-laki masih lebih besar pada jabatan Sekda, Sekwan, Inspektur, Kaban dan Kadin di Setda,	Dokumen Anjab ABK yang belum responsif gender	Tindak lanjut perubahan SOTK pada Setda, Setwan, Inspektorat, Badan dan Dinas	Tersusunnya dokumen Anjab ABK Setda, Setwan, Inspektorat, Badan dan Dinas di Pemerintah Kabupaten Blitar yang responsive gender	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan pendampingan kepada Setda, Setwan, Inspektorat, Badan dan Dinas terkait prosedur penyusunan Anjab ABK yang responsive gender Rekonstruksi Anjab ABK Setda, Setwan, Inspektorat, Badan dan Dinas dengan Bagian Organisasi yang responsive gender 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten Blitar terdiri dari 52 Perangkat Daerah. 52 Perangkat Daerah terdiri dari 30 Setda, Setwan, Inspektorat, Badan dan Dinas, dan 22 Kecamatan. Jumlah ASN laki-laki di Pemkab Blitar sebanyak 3435 Jumlah ASN perempuan di Pemkab Blitar sebanyak 5974 Jumlah ASN laki-laki jabatan Sekda, Sekwan, Inspektur, 	<p>Outcome (Indikator Program): Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Output (Indikator Kegiatan): Persentase perangkat daerah yang memiliki organisasi tepat fungsi dan tepat ukuran</p> <p>Output (Indikator Subkegiatan): Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan</p>
2.	Mendukung Misi 3 RPJMD: Pengoptimalan Kinerja Pemerintah Yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas								
3.	Kebijakan: Meningkatnya kinerja Penyelenggara urusan bidang koordinasi bidang administrasi								
4.	Program: Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota /Kota								

No.	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
			Faktor Kesenja- ngan	Sebab Kesenja- ngan Internal	Sebab Kesenja- ngan Ekster- nal	Reformulasi Tuj- uan	Rencana Aksi	Database (Base-line)	Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5.	Kegiatan Penataan Organisasi	dan Keuangan Daerah	Setwan, Inspektorat, Badan dan Dinas					Kadin di Setda, Setwan, Inspektorat, Badan dan Dinas sebanyak 23	Indikator Aktifitas: <ul style="list-style-type: none"> • Persentase pemahaman Setda, Setwan, Inspektorat, Badan dan Dinas terhadap prosedur penyusunan Anjab ABK yang responsive gender • Jumlah laporan hasil rekon Anjab ABK Setda, Setwan, Inspektorat, Badan dan Dinas dengan Bagian Organisasi yang responsive gender
6.	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2. Pemerintah Kabupaten Blitar terdiri dari 52 Perangkat Daerah	Kontrol: Pembuat keputusan pada jabatan Sekda, Sekwan, Inspektur, Kabin dan Kadin di Setda, Setwan, Inspektorat, Badan dan Dinas di dominasi oleh laki-laki				• Jumlah ASN perempuan jabatan Sekda, Sekwan, Inspektur, Kabin dan Kadin di Setda, Setwan, Inspektorat, Badan dan Dinas sebanyak 3		
7.	Tujuan Sub Kegiatan Tersusunnya dokumen kelembagaan dan analisis jabatan	3. 52 Perangkat Daerah terdiri dari 30 Setda, Setwan, Inspektorat, Badan dan Dinas, dan 22 Kecamatan.	Manfaat: Penerima manfaat pada jabatan Sekda, Sekwan, Inspektur, Kabin dan Kadin di Setda, Setwan, Inspektorat,				• Memberikan pendampingan kepada Setda, Setwan, Inspektorat, Badan dan Dinas terkait prosedur penyusunan Anjab ABK yang responsive gender		
8.	Sasaran Pemerintah Kabupaten Blitar	4. Jumlah ASN laki-laki di Pemkab Blitar sebanyak 3435 5. Jumlah ASN perempuan di Pemkab Blitar sebanyak 5974 6. Jumlah ASN laki-laki jabatan Sekda, Sekwan, Inspektur, Kabin dan Kadin di Setda, Setwan,							

No.	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
			Faktor Kesenja ngan	Sebab Kesenja ngan Internal	Sebab Kesenja ngan Ekster nal	Reformulasi Tuj uan	Rencana Aksi	Database (Base-line)	Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Inspektorat, Badan dan Dinas sebanyak 23 7. Jumlah ASN perempuan jabatan Sekda, Sekwan, Inspektur, Kaban dan Kadin di Setda, Setwan, Inspektor at, Badan dan Dinas sebanyak 3	Badan dan Dinas masih dirasakan oleh laki-laki					<ul style="list-style-type: none"> Rekon Anjab ABK Setda, Setwan, Inspektorat, Badan dan Dinas dengan Bagian Organisasi yang responsive gender 	

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) TA. 2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

PERANGKAT DAERAH	Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
TAHUN ANGGARAN	2023
PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/TUJUAN SUBKEGIATAN/INDIKATOR/SASARAN	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Kegiatan : Penataan Organisasi
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
	Tujuan : Tersusunnya dokumen kelembagaan dan analisis jabatan
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan
	Sasaran : Pemerintah Kabupaten Blitar
KODE SUB KEGIATAN	4.01.01.2.13.001
ANALISIS SITUASI	<p>Data Pembuka Wawasan: Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perda No.2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab.Blitar 2021-2026 Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah <p>Pemerintah Kabupaten Blitar terdiri dari 52 Perangkat Daerah</p> <p>52 Perangkat Daerah terdiri dari 30 Setda, Setwan, Inspektorat, Badan dan Dinas, dan 22 Kecamatan.</p> <p>Jumlah ASN laki-laki di Pemkab Blitar sebanyak 3435</p> <p>Jumlah ASN perempuan di Pemkab Blitar sebanyak 5974</p> <p>Jumlah ASN laki-laki jabatan Sekda, Sekwan, Inspektur, Kaban dan Kadin di Setda, Setwan, Inspektorat, Badan dan Dinas sebanyak 23</p> <p>Jumlah ASN perempuan jabatan Sekda, Sekwan, Inspektur, Kaban dan Kadin di Setda, Setwan, Inspektorat, Badan dan Dinas sebanyak 3</p> <p>Faktor Kesenjangan Gender:</p> <ol style="list-style-type: none"> Akses: Fasilitasi penyusunan Anjab dan ABK Setda, Setwan, Inspektorat, Badan dan Dinas pada jabatan Sekda, Sekwan, Inspektur, Kaban dan Kadin masih banyak diampu oleh laki-laki Partisipasi: Partisipasi laki-laki masih lebih besar pada jabatan Sekda, Sekwan, Inspektur, Kaban dan Kadin di Setda, Setwan, Inspektorat, Badan dan Dinas

	<p>3. Kontrol; Pembuat keputusan pada jabatan Sekda, Sekwan, Inspektur, Kaban dan Kadin di Setda, Setwan, Inspektorat, Badan dan Dinas didominasi oleh laki-laki</p> <p>4. Manfaat: Penerima manfaat pada jabatan Sekda, Sekwan, Inspektur, Kaban dan Kadin di Setda, Setwan, Inspektorat, Badan dan Dinas masih dirasakan oleh laki-laki</p> <p>Sebab Kesenjangan Gender:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internal: Dokumen Anjab ABK yang belum responsif gender • Eksternal: Tindak lanjut perubahan SOTK pada Setda, Setwan, Inspektorat, Badan dan Dinas 	
CAPAIAN SUB KEGIATAN	Tolak Ukur : Tujuan Subkegiatan yang telah direformasi Tersusunnya dokumen Anjab ABK Setda, Setwan, Inspektorat, Badan dan Dinas di Pemerintah Kabupaten Blitar yang responsive gender	
	<p>Indikator dan Target Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Output Subkegiatan: Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan • Outcome Subkegiatan: Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 	
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN	Rp 475.469.000	
RENCANA AKSI	Aktivitas Seksi	Penyusunan Dokumen Anjab ABK
	Masukan/ Input	Rp. 95.668.569
	Keluaran/ Output	- Persentase pemahaman Setda, Setwan, Inspektorat, Badan dan Dinas terhadap prosedur penyusunan Anjab ABK yang responsive gender - Jumlah laporan hasil rekon Anjab ABK Setda, Setwan, Inspektorat, Badan dan Dinas dengan Bagian Organisasi yang responsive gender
	Hasil/ Outcome	Dokumen Anjab ABK Setda, Setwan, Inspektorat, Badan dan Dinas yang responsive gender

TERM OF REFERENCE (TOR) APBD TA. 2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Nama OPD : Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
 Tahun : 2023

1.	PROGRAM	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.	SASARAN PROGRAM	Pemerintah Kabupaten Blitar
3.	KEGIATAN	Penataan Organisasi
4.	SUB KEGIATAN	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
5.	LATAR BELAKANG	<p>1. Perda No. 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab Blitar Tahun 2021-2026</p> <p>2. Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah</p>
	DASAR HUKUM	
	GAMBARAN UMUM	<p>Pemerintah Kabupaten Blitar terdiri dari 52 Perangkat Daerah</p> <p>52 Perangkat Daerah terdiri dari 30 Setda, Setwan, Inspektorat, Badan dan Dinas, dan 22 Kecamatan.</p> <p>Jumlah ASN laki-laki di Pemkab Blitar sebanyak 3435</p> <p>Jumlah ASN perempuan di Pemkab Blitar sebanyak 5974</p> <p>Jumlah ASN laki-laki jabatan Sekda, Sekwan, Inspektur, Kaban dan Kadin di Setda, Setwan, Inspektorat, Badan dan Dinas sebanyak 23</p> <p>Jumlah ASN perempuan jabatan Sekda, Sekwan, Inspektur, Kaban dan Kadin di Setda, Setwan, Inspektorat, Badan dan Dinas sebanyak 3</p> <p>Akses: Fasilitasi penyusunan Anjab dan ABK Setda, Setwan, Inspektorat, Badan dan Dinas pada jabatan Sekda, Sekwan, Inspektur, Kaban dan Kadin masih banyak diampu oleh laki-laki</p> <p>Partisipasi: Partisipasi laki-laki masih lebih besar pada jabatan Sekda, Sekwan, Inspektur, Kaban dan Kadin di Setda, Setwan, Inspektorat, Badan dan Dinas</p> <p>Kontrol: Pembuat keputusan pada jabatan Sekda, Sekwan, Inspektur, Kaban dan Kadin di Setda, Setwan, Inspektorat, Badan dan Dinas didominasi oleh laki-laki</p>

			Manfaat: Penerima manfaat pada jabatan Sekda, Sekwan, Inspektur, Kaban dan Kadin di Setda, Setwan, Inspektorat, Badan dan Dinas masih dirasakan oleh laki-laki
6.	AKTIVITAS	URAIAN AKTIVITAS	1. Memberikan pendampingan kepada Setda, Setwan, Inspektorat, Badan dan Dinas terkait prosedur penyusunan Anjab ABK yang responsive gender 2. Rekon Anjab ABK Setda, Setwan, Inspektorat, Badan dan Dinas dengan Bagian Organisasi yang responsive gender
		INDIKATOR KINERJA	Indikator Subkegiatan: Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan Target Kinerja: Persentase perangkat daerah yang memiliki organisasi tepat fungsi dan tepat ukuran
		BATASAN SUB KEGIATAN	Sosialisasi, Pengisian Formulir Anjab ABK, Croscheck Data
7.	MAKSUD DAN TUJUAN		Tersusunnya dokumen Anjab ABK Setda, Setwan, Inspektorat, Badan dan Dinas di Pemerintah Kabupaten Blitar
8.	CARA PELAKSANAAN SUBKEGIATAN		Kontrak SPK
9.	WAKTU, TEMPAT PELAKSANAAN DAN STRATEGI INTEGRASI GENDER PER AKTIVITAS		Penyusunan Dokumen Anjab ABK
			Integrasi Gender : Memberikan pendampingan tanpa membedakan gender
			Anggaran : Rp . 95.668.569
			Tempat : Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
			Waktu : Triwulan I dan II
			Peserta : Setda, Setwan, Inspektorat, Seluruh Badan dan Seluruh Dinas di Pemerintah Kabupaten Blitar
			Pelaksana : Bagian Organisasi dan PT. Pradana Utama Konsulindo
	Aktivitas Pendukung : Rp 379.800.431		
10.	PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN		Kepala Bagian Organisasi
11.	JADWAL		Januari - Desember 2023
12.	BIAYA		Rp 475.469.000

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN ANGGARAN 2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**

No.	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
			Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
1.	Visi Bupati Blitar: Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Baldatun, Thoyyibatun, Warobbun Ghoffur)	1. Dasar Hukum: - Perda No.2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab.Blitar 2021-2026 - Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	Akses: Mayoritas <i>Master of Ceremony</i> (MC) dari Protokol adalah perempuan Partisipasi: Yang mempunyai keahlian untuk menjadi MC mayoritas perempuan Kontrol; Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Manfaat: Adanya MC dari laki-laki pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	MC kegiatan /acara pada Sub bagian Protokol adalah perempuan	Belum ada pelatihan MC untuk laki-laki	Adanya MC dari kalangan laki-laki di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Mengadakan bimbingan teknis keprotokolan	- Jumlah ASN Bagian Protokol dan Komunikasi 9 orang. Laki-laki: 4; perempuan: 5 - Jumlah Non ASN: 7, laki-laki: 5; perempuan: 2 - Jumlah Pejabat Struktural pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 2 orang, laki-laki: 2; perempuan: 0. - Jumlah pejabat fungsional 1 orang. Laki-laki: 0; perempuan : 1 - Jumlah pegawai ASN dan Non ASN pada: Sub Bagian Protokol Keprotokolan 5 orang Laki laki	Outcome (Indikator Program): Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (100%) Output (Indikator Kegiatan): Persentase fasilitasi Keprotokolan yang berkualitas Output (Indikator Subkegiatan): Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Indikator Kinerja Aktifitas: Untuk tahun selanjutnya atau pada Tahun 2024 jumlah MC laki-laki dari Bagian
2.	Mendukung Misi 3 RPJMD: Pengoptimalan Kinerja Pemerintah Yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas								
3.	Kebijakan: Meningkatnya kinerja Penyelenggara urusan bidang koordinasi bidang administrasi								
4.	Program: Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota								

5.	Kegiatan: Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2. Jumlah ASN Bagian Protokol dan Komunikasi 9 orang. Laki-laki: 4; perempuan: 5						2; perempuan: 3 - Sub Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan 8 orang. Laki-laki: 5; perempuan: 3 - Jumlah Pranata Humas 1 orang. Laki-laki : 0 orang; perempuan 1 orang.	Protokol dan Komunikasi Pimpinan harus ada.
6.	Subkegiatan: Fasilitasi Keprotokolan	3. Jumlah Non ASN: 7. Laki-laki: 5; perempuan: 2							
7.	Tujuan Subkegiatan: Adanya MC dari kalangan laki-laki di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4. Jumlah Pejabat Struktural pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 2 orang, laki-laki: 2; perempuan: 0.							
8.	Sasaran: ASN dan Non ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	5. Jumlah pejabat fungsional 1 orang. Laki-laki: 0; perempuan: 1 6. Jumlah pegawai ASN dan Non ASN pada Sub Bagian Protokol Keprotokolan 5 orang. Laki-laki: 2; perempuan 3 7. Sub Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan 8 orang. Laki-laki 5; perempuan: 3 8. Jumlah Pranata Humas 1 orang. Laki-laki : 0; perempuan: 1							

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) TA. 2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

PERANGKAT DAERAH	Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
TAHUN ANGGARAN	2023
PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/TUJUAN SUBKEGIATAN/INDIKATOR/SASARAN	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Kegiatan : Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Keprotokolan
	Tujuan : Adanya MC dari kalangan laki-laki di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan
	Sasaran : ASN dan Non ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
KODE SUB KEGIATAN	4.01.01.2.14.01
ANALISIS SITUASI	<p>Data Pembuka Wawasan: Dasar Hukum: 1. Perda No.2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab.Blitar 2021-2026 2. Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah</p> <p>Jumlah ASN Bagian Protokol dan Komunikasi 9 orang. Laki-laki: 4; perempuan: 5 Jumlah Non ASN: 7. Laki-laki: 5; perempuan: 2 Jumlah Pejabat Struktural pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 2 orang, laki-laki: 2; Jumlah pejabat fungsional 1 orang, perempuan: 1 Jumlah pegawai ASN dan Non ASN pada Sub Bagian Protokol Keprotokolan 5 orang. Perempuan 3 dan laki-laki 2 orang. Sub Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan Laki-laki 5; perempuan 3 orang. Jumlah Pranata Humas 1 orang. Laki-laki : 0 orang; perempuan 1 orang.</p> <p>Faktor Kesenjangan Gender: 1. <u>Akses</u>: Mayoritas <i>Master of Ceremony</i> (MC) dari Protokol adalah perempuan 2. <u>Partisipasi</u>: Yang mempunyai keahlian untuk menjadi MC mayoritas perempuan 3. <u>Kontrol</u>; Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 4. <u>Manfaat</u>: Adanya MC dari laki-laki pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</p>

	Sebab Kesenjangan Gender: <ul style="list-style-type: none"> • Internal: MC kegiatan /acara pada Sub bagian Protokol adalah perempuan • Eksternal: Belum ada pelatihan MC untuk laki-laki 	
CAPAIAN SUB KEGIATAN	Tolak Ukur : Tujuan Subkegiatan yang telah direformasi Adanya MC dari kalangan laki-laki di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
	Indikator dan Target Kinerja <ul style="list-style-type: none"> • Output Subkegiatan: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan • Outcome Subkegiatan: Untuk tahun selanjutnya atau pada tahun 2024 jumlah MC laki-laki dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan harus ada. 	
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN	Rp 267.989.380	
RENCANA AKSI	Aktivitas Seksi	Mengadakan Bimbingan Teknis Keprotokolan
	Masukan/ Input	Rp. 25.000.000
	Keluaran/ Output	Tercapainya keikutsertaan Pelatihan pengembangan <i>Master of Ceremony (public speaker)</i> bagi ASN dan Non ASN pada Bagian Prokopim sebanyak laki-laki 9 orang dan perempuan 7 orang
	Hasil/ Outcome	Meningkatnya <i>skill</i> sebagai <i>Master of Ceremony (public speaker)</i> baik pegawai laki-laki maupun perempuan

TERM OF REFERENCE (TOR) APBD TA. 2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Nama OPD : Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
 Tahun : 2023

1.	PROGRAM		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.	SASARAN PROGRAM		Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi pimpinan yang berkualitas
3.	KEGIATAN		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4.	SUB KEGIATAN		Fasilitasi Keprotokolan
5.	LATAR BELAKANG	DASAR HUKUM	<p>1. Perda No. 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab Blitar Tahun 2021-2026</p> <p>2. Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah</p>
		GAMBARAN UMUM	<p>Jumlah ASN Bagian Protokol dan Komunikasi 9 orang. Laki-laki : 4; perempuan : 5</p> <p>Jumlah Non ASN: 7. Laki-laki: 5; perempuan: 2</p> <p>Jumlah Pejabat Struktural pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 2 orang. Laki-laki: 2; perempuan: 0</p> <p>Jumlah pejabat fungsional: 1 orang. Laki-laki: 0; perempuan: 1</p> <p>Jumlah pegawai ASN dan Non ASN pada: Sub Bagian Protokol Keprotokolan 5 orang. Laki-laki: 2; perempuan: 3</p> <p>Sub Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan 8 orang. Laki-laki: 5; perempuan: 3.</p> <p>Jumlah Pranata Humas 1 orang. Laki-laki: 0; perempuan: 1</p> <p>Akses: Mayoritas <i>Master of Ceremony</i> (MC) dari Protokol adalah perempuan</p> <p>Partisipasi: Yang mempunyai keahlian untuk menjadi MC mayoritas perempuan</p> <p>Kontrol; Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</p> <p>Manfaat: Adanya MC dari laki-laki pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</p>
6.	AKTIVITAS	URAIAN AKTIVITAS	<p>1. Koordinasi Acara</p> <p>2. SOP Kegiatan yang akan berlangsung</p> <p>3. Pelaksanaan acara dengan MC laki-laki</p>

		4. Monitoring dan Evaluasi kegiatan dengan MC dari laki-laki tertentu yang sifatnya keprotokolan
	INDIKATOR KINERJA	Indikator Subkegiatan: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan Target Kinerja: Untuk tahun selanjutnya atau pada tahun 2024 jumlah MC laki-laki dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan harus ada.
	BATASAN SUB KEGIATAN	Bimbingan Teknis
7.	MAKSUD DAN TUJUAN	Adanya MC dari kalangan laki-laki di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
8.	CARA PELAKSANAAN SUBKEGIATAN	Swakelola
9.	WAKTU, TEMPAT PELAKSANAAN DAN STRATEGI INTEGRASI GENDER PER AKTIVITAS	Bimbingan Teknis Keprotokolan Integrasi Gender : Undangan peserta bimtek mempertimbangkan keseimbangan gender Anggaran : Rp. 25.000.000 Tempat : Pemerintah Kabupaten Blitar Waktu : Triwulan III-IV Peserta : ASN dan Non ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pelaksana : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Aktivitas Pendukung : Rp 242.989.380
10.	PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
11.	JADWAL	Januari - Desember 2023
12.	BIAYA	Rp 267.989.380

Blitar, 23 Pebruari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLITAR,



[Signature]
Drs. IZUL MAROM, M.Sc.

Pembina Utama Madya

NIP. 19650603 199002 1 002

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN ANGGARAN 2023
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

No	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
			Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Database (Base-line)	Indikator Kinerja
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Visi Bupati Blitar: Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Baladun, Thoyyibatun, Warobbun Ghoffur)	1. Dasar Hukum: - Perda No.2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab.Blitar 2021-2026 - Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	Akses : - Partisipasi: Kurang optimalnya data dukung dalam LPPD Kabupaten Blitar Kontrol: - Manfaat : data dukung dapat tercukupi dengan kualitas data yang baik	Kurangnya optimalnya data pendukung LPPD	Perbedaan interpretasi terhadap data dukung yang dibutuhkan	Kepala PD dan petugas penyusun LPPD dapat lebih memahami data pendukung LPPD yang dibutuhkan	Kewajiban keseimbangan jumlah peserta perempuan dan laki-laki dalam kegiatan sosialisasi	Cakupan : Terlaksananya kegiatan sosialisasi penyusunan LPPD Kabupaten Blitar Pelaksanaan kegiatan yang mendukung responsif gender : Keseimbangan pembagian jumlah peserta perempuan dan laki-laki	Outcome (Indikator Program): Meningkatnya program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Output (Indikator Kegiatan): Persentase permasalahan administrasi tata pemerintahan yang terselesaikan Output (Indikator Subkegiatan): Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah Indikator Kinerja Aktifitas: Meningkatnya Kualitas data



No	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
			Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Database (Base-line)	Indikator Kinerja
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Program: Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Daerah							
6.	Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan	2. Kegiatan Sosialisasi Penyusunan LPPD Kabupaten Blitar							
7.	Subkegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	- Jumlah peserta : 90 peserta terdiri dari 50 orang laki-laki dan 40 orang perempuan							
8.	Tujuan Subkegiatan: Meningkatkan pemahaman dan kualitas penyusunan LPPD Kabupaten Blitar	- Narasumber : 1 orang laki-laki							
9.	Sasaran : Kepala PD dan petugas penyusun LPPD	- Wilayah : Kabupaten Blitar							

**GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) TA. 2023
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

PERANGKAT DAERAH	Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
TAHUN ANGGARAN	2023
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ TUJUAN SUBKEGIATAN/ INDIKATOR/ SASARAN	Program : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
	Tujuan : Meningkatkan pemahaman dan kualitas penyusunan LPPD Kabupaten Blitar
	Indikator Sub Kegiatan : Meningkatnya Kualitas data pendukung LPPD
	Sasaran : Kepala PD dan petugas penyusun LPPD
KODE SUB KEGIATAN	5.1.02.01.01.0052
ANALISIS SITUASI	<p>Data Pembuka Wawasan: Dasar Hukum: 1. Perda No.2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab.Blitar 2021-2026 2. Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah</p> <p>Kegiatan Sosialisasi Penyusunan LPPD Kabupaten Blitar - Jumlah peserta : 90 orang (40 orang perempuan, 50 orang laki-laki) - Narasumber : 1 orang - Wilayah : Kabupaten Blitar</p> <p>Faktor Kesenjangan Gender: 1. <u>Akses</u>: - 2. <u>Partisipasi</u>: Kurang optimalnya data dukung dalam LPPD Kabupaten Blitar 3. <u>Kontrol</u>: Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 4. <u>Manfaat</u>: Data dukung dapat tercukupi dengan kualitas data yang baik</p> <p>Sebab Kesenjangan Gender: • Internal: Kurangnya optimalnya data pendukung LPPD • Eksternal: Perbedaan interpretasi terhadap data dukung yang dibutuhkan</p>
CAPAIAN SUB KEGIATAN	Tolak Ukur : Tujuan Subkegiatan yang telah direformasi Kepala PD dan petugas penyusun LPPD dapat lebih memahami data pendukung LPPD yang dibutuhkan

	Indikator dan Target Kinerja <ul style="list-style-type: none"> • Output Subkegiatan: Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah • Outcome Subkegiatan: Meningkatnya Kualitas data pendukung LPPD 	
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN	Rp 161.972.200	
RENCANA AKSI	Aktivitas Seksi	Sosialisasi Penyusunan LPPD Kabupaten Blitar
	Masukan/ Input	Rp. 161.972.200
	Keluaran/ Output	Kewajiban keseimbangan jumlah peserta perempuan dan laki-laki
	Hasil/ Outcome	Meningkatnya Kualitas data pendukung LPPD

**TERM OF REFERENCE (TOR) APBD TA. 2023
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

Nama OPD : Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
Tahun : 2023

1.	PROGRAM		Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2.	SASARAN PROGRAM		Kepala Perangkat Daerah dan Petugas Penyusun LPPD
3.	KEGIATAN		Administrasi Tata Pemerintahan
4.	SUB KEGIATAN		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
5.	LATAR BELAKANG	DASAR HUKUM	1. Perda No. 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab Blitar Tahun 2021-2026 2. Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
		GAMBARAN UMUM	Kegiatan Sosialisasi Penyusunan LPPD Kabupaten Blitar - Jumlah peserta : 90 orang (40 orang perempuan, 50 orang laki-laki) - Narasumber : 1 orang - Wilayah : Kabupaten Blitar Akses: - Partisipasi: Kurang optimalnya data dukung dalam LPPD Kabupaten Blitar Kontrol; - Manfaat: Data dukung dapat tercukupi dengan kualitas data yang baik
6.	AKTIVITAS	URAIAN AKTIVITAS	Sosialisasi Penyusunan LPPD pada seluruh Perangkat Daerah
		INDIKATOR KINERJA	Meningkatnya Kualitas data pendukung LPPD
		BATASAN SUB KEGIATAN	Sosialisasi
7.	MAKSUD DAN TUJUAN		Meningkatnya kualitas data pendukung LPPD Kabupaten Blitar
8.	CARA PELAKSANAAN SUBKEGIATAN		Swakelola

9.	WAKTU, TEMPAT PELAKSANAAN DAN STRATEGI INTEGRASI GENDER PER AKTIVITAS	Sosialisasi Penyusunan LPPD Kabupaten Blitar
		Integrasi Gender : Undangan peserta sosialisasi mempertimbangkan keseimbangan gender
		Anggaran : Rp 161.972.200
		Tempat : Hall Pertemuan
		Waktu : Triwulan II
		Peserta : Kepala Perangkat Daerah dan petugas penyusun LPPD
		Pelaksana : Bagian Tata Pemerintahan
10.	PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUBKEGIATAN	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
11.	JADWAL	Januari - Desember 2023
12.	BIAYA	Rp 161.972.200

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN ANGGARAN 2023
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

No.	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
			Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
1.	Visi Bupati Blitar: Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Baladun, Thoyyibatun, Warobbun Ghoffur)	1. Dasar Hukum: - Perda No.2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab.Blitar 2021-2026 - Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	Akses: Memahami dan mengerti tentang semua agama pada hari besar keagamaan Partisipasi: Penyelenggaraan acara keagamaan Kontrol; Kepala Bagian Bagian Kesejahteraan Rakyat Manfaat: Membantu acara keagamaan yang diselenggarakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan yang dilaksanakan masih didominasi peserta laki-laki	Pada kegiatan pemulasaran jenazah masih kurangnya/minimnya ketrampilan perempuan tentang pemulasaran jenazah	Meningkatnya ketrampilan perempuan tentang pemulasaran jenazah	Mengadakan pelatihan pemulasaran jenazah bagi perempuan	Sudah pernah melaksanakan pelatihan pemulasaran jenazah dengan peserta 80% mayoritas laki-laki	Outcome (Indikator Program): Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Output (Indikator Kegiatan): Persentase Pelayanan kepada masyarakat dengan cara memfasilitasi membentuk akhlak yang mulia Output (Indikator Subkegiatan): Terfasilitasinya perayaan hari-hari besar di semua agama, terfasilitasinya calon jamaah haji, terfasilitasinya jumlah penentuan
2.	Mendukung Misi 3 RPJMD: Pengoptimalan Kinerja Pemerintah Yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas								
3.	Kebijakan: Meningkatnya kinerja Penyelenggara urusan bidang koordinasi bidang adminstrasi								
4.	Program: Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat								

No.	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
			Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
5.	Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Subkegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Tujuan Subkegiatan: Terfasilitasinya kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan di Kabupaten Blitar Sasaran: ASN dan Non ASN serta masyarakat Kabupaten Blitar	2. Jumlah ASN Bagian Kesejahteraan Rakyat 6 orang. Laki-laki: 3; perempuan: 3							hari besar, jumlah peserta yang terfasilitasi untuk Lomba Musabaqoh Tilawatil Qur'an
6.		3. Jumlah Non ASN: 2. Laki-laki: 1; perempuan: 1							Indikator Kinerja Aktifitas: Persentase peserta perempuan yang mengikuti pelatihan pemulasaran jenazah
7.		4. Jumlah Pejabat Struktural pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Pimpinan 1 orang, laki-laki: 1; perempuan: 0.							
8.		5. Jumlah pejabat fungsional 1 orang. Laki-laki: 1; perempuan: 0							
		6. Jumlah pegawai ASN sebagai Penyusun Program Pengawasan Kesejahteraan Rakyat 1 orang. Laki-laki: 0; perempuan 1							

No.	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
			Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
		<p>7. Jumlah pegawai ASN sebagai Penyusun Program Pengabdian Kepada Masyarakat 1 orang. Laki-laki: 0; perempuan 1</p> <p>8. Jumlah pegawai ASN sebagai Penyusun Bahan Pembinaan Keagamaan 1 orang. Laki-laki: 0; perempuan 1</p> <p>9. Jumlah pegawai ASN sebagai Pengadministrasi Umum 1 orang. Laki-laki: 1; perempuan 0</p>							

**GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) TA. 2023
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

PERANGKAT DAERAH	Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
TAHUN ANGGARAN	2023
PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/TUJUAN SUBKEGIATAN/INDIKATOR/SASARAN	Program : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
	Tujuan : Terasilitasinya kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan di Kabupaten Blitar
	Indikator Sub Kegiatan : Terasilitasinya perayaan hari-hari besar di semua agama, terfasilitasinya calon jamaah haji, terfasilitasinya jumlah penentuan hari besar, jumlah peserta yang terfasilitasi untuk Lomba Musabaqoh Tilawatil Qur'an
Sasaran : ASN dan Non ASN serta masyarakat Kabupaten Blitar	
KODE SUB KEGIATAN	4.01.02.2.02.001
ANALISIS SITUASI	<p>Data Pembuka Wawasan: Dasar Hukum: 1. Perda No.2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab.Blitar 2021-2026 2. Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah</p> <p>Jumlah ASN Bagian Kesejahteraan Rakyat 6 orang. Laki-laki: 3; perempuan: 3 Jumlah Non ASN: 2. Laki-laki: 1; perempuan: 1 Jumlah Pejabat Struktural pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Pimpinan 1 orang, laki-laki: 1; perempuan: 0. Jumlah pejabat fungsional 1 orang. Laki-laki: 1; perempuan: 0 Jumlah pegawai ASN sebagai Penyusun Program Pengawasan Kesejahteraan Rakyat 1 orang. Laki-laki: 0; perempuan 1 Jumlah pegawai ASN sebagai Penyusun Program Pengabdian Kepada Masyarakat 1 orang. Laki-laki: 0; perempuan 1 Jumlah pegawai ASN sebagai Penyusun Bahan Pembinaan Keagamaan 1 orang. Laki-laki: 0; perempuan 1 Jumlah pegawai ASN sebagai Pengadministrasi Umum 1 orang. Laki-laki: 1; perempuan 0</p> <p>Faktor Kesenjangan Gender: 1. Akses: Memahami dan mengerti tentang semua agama pada hari besar keagamaan 2. Partisipasi: Penyelenggaraan acara keagamaan</p>

	<p>3. Kontrol; Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat</p> <p>4. Manfaat: Membantu acara keagamaan yang diselenggarakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat</p> <p>Sebab Kesenjangan Gender:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internal: Kegiatan yang dilaksanakan masih didominasi peserta laki-laki • Eksternal: Pada kegiatan pemulasaran jenazah masih kurangnya/minimnya ketrampilan perempuan tentang pemulasaran jenazah 	
CAPAIAN SUB KEGIATAN	Tolak Ukur : Meningkatnya ketrampilan perempuan tentang pemulasaran jenazah	
	<p>Indikator dan Target Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Output Subkegiatan: Persentase terfasilitasinya perayaan hari-hari besar di semua agama, calon jamaah haji, jumlah penentuan hari besar, dan jumlah peserta untuk Lomba Musabaqoh Tilawatil Qur'an • Outcome Subkegiatan: Persentase perayaan hari-hari besar di semua agama, calon jamaah haji, jumlah penentuan hari besar, jumlah peserta untuk Lomba Musabaqoh Tilawatil Qur'an yang terfasilitasi 	
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN	Rp. 1.001.682.337,-	
RENCANA AKSI	Aktivitas Seksi	Mengadakan pelatihan pemulasaran jenazah bagi perempuan
	Masukan/ Input	Rp. 16.500.000,-
	Keluaran/ Output	Terfasilitasinya kegiatan pelatihan pemulasaran jenazah bagi perempuan
	Hasil/ Outcome	Meningkatnya ketrampilan perempuan dalam pemulasaran jenazah

**TERM OF REFERENCE (TOR) APBD TA. 2023
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

Nama OPD : Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
Tahun : 2023

1.	PROGRAM	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2.	SASARAN PROGRAM	ASN dan Non ASN serta masyarakat Kabupaten Blitar
3.	KEGIATAN	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
4.	SUB KEGIATAN	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
5.	LATAR BELAKANG	<p>1. Perda No. 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab Blitar Tahun 2021-2026</p> <p>2. Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah</p>
	DASAR HUKUM	
	GAMBARAN UMUM	<p>Jumlah ASN Bagian Kesejahteraan Rakyat 6 orang. Laki-laki: 3; perempuan: 3</p> <p>Jumlah Non ASN: 2. Laki-laki: 1; perempuan: 1</p> <p>Jumlah Pejabat Struktural pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Pimpinan 1 orang, laki-laki: 1; perempuan: 0.</p> <p>Jumlah pejabat fungsional 1 orang. Laki-laki: 1; perempuan: 0</p> <p>Jumlah pegawai ASN sebagai Penyusun Program Pengawasan Kesejahteraan Rakyat 1 orang. Laki-laki: 0; perempuan 1</p> <p>Jumlah pegawai ASN sebagai Penyusun Program Pengabdian Kepada Masyarakat 1 orang. Laki-laki: 0; perempuan 1</p> <p>Jumlah pegawai ASN sebagai Penyusun Bahan Pembinaan Keagamaan 1 orang. Laki-laki: 0; perempuan 1</p> <p>Jumlah pegawai ASN sebagai Pengadministrasi Umum 1 orang. Laki-laki: 1; perempuan 0</p> <p>Akses: Memahami dan mengerti tentang semua agama pada hari besar keagamaan</p> <p>Partisipasi: Penyelenggaraan acara keagamaan</p> <p>Kontrol; Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat</p> <p>Manfaat: Membantu acara keagamaan yang diselenggarakan oleh Bagiar</p>

6.	AKTIVITAS	URAIAN AKTIVITAS	1. Koordinasi acara keagamaan dan perayaan 2. SOP Kegiatan yang akan berlangsung 3. Membuat kebijakan yang terkait dengan Tupoksi Bagian Kesejahteraan Rakyat 4. Monitoring dan Evaluasi hibah yang bersumber dari APBD
		INDIKATOR KINERJA	Indikator Subkegiatan: Persentase terfasilitasinya perayaan hari-hari besar di semua agama, calon jamaah haji, jumlah penentuan hari besar, dan jumlah peserta untuk Lomba Musabaqoh Tilawatil Qur'an Target Kinerja: Persentase perayaan hari-hari besar di semua agama, calon jamaah haji, jumlah penentuan hari besar, jumlah peserta untuk Lomba Musabaqoh Tilawatil Qur'an yang terfasilitasi
		BATASAN SUB KEGIATAN	Pelatihan
7.	MAKSUD DAN TUJUAN		Meningkatnya ketrampilan perempuan tentang pemulasaran jenazah
8.	CARA PELAKSANAAN SUBKEGIATAN		Kontrak
9.	WAKTU, TEMPAT PELAKSANAAN DAN STRATEGI INTEGRASI GENDER PER AKTIVITAS		Pelatihan Pemulasaran Jenazah
			Integrasi Gender : Undangan peserta pelatihan pemulasaran jenazah
			Anggaran : Rp 16.500.000
			Tempat : Kabupaten Blitar
			Waktu : Triwulan III-IV
			Peserta : Masyarakat Kabupaten Blitar
			Pelaksana : Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Aktivitas Pendukung : Rp. 985.182.337,-		
10.	PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN		Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
11.	JADWAL		Juni- Desember 2023
12.	BIAYA		Rp. 1.001.682.337,-

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN ANGGARAN 2023
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

No	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan RencanakeDepan		Pengukuran Hasil	
			Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Database (Base-line)	Indikator Kinerja
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Visi Bupati Blitar: Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Baladun, Thoyyibatun, Warobbun Ghoffur) Mendukung Misi 3 RPJMD: Pengoptimalan Kinerja Pemerintah Yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas Kebijakan: Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas pengambil kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	1. Landasan Hukum: - Perda No. 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab Blitar Tahun 2021-2026 - Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	Akses: - Partisipasi: Peserta perempuan kurang aktif dalam kegiatan masyarakat Kontrol: - Manfaat: meningkatnya jumlah peserta perempuan pada penyuluhan	-	Minimnya jumlah perempuan yang aktif dalam kegiatan masyarakat dibandingkan dengan laki-laki	Meningkatnya jumlah partisipasi peserta perempuan dalam mendukung kegiatan penyuluhan hukum di masyarakat	Peningkatan Pembangunan Hukum melalui Penyebarluasan Informasi Hukum dan Pelayanan Hukum	Cakupan: Terlaksananya kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat pada akhir tahun 2022 adalah 100%. Pelaksanaan kegiatan yang mendukung responsif gender: Keseimbangan pembagian jumlah peserta perempuan dan laki-laki	Outcome (Indikator Program): Persentase tingkat capaian kinerja Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (100%) Output (Indikator Kegiatan): Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran Output (Indikator Subkegiatan): Jumlah penyuluhan hukum sebanyak 15 kali di Kecamatan Kabupaten Blitar dengan total 840 orang peserta

	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
No	Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan RencanakeDepan		Pengukuran Hasil	
			Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Database (Base-line)	Indikator Kinerja
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Program: Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Daerah							Outcome (Indikator Aktifitas): Tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum dengan memberikan kuis atau survei pada peserta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum, untuk melihat sejauh mana peserta memahami materi yang telah disampaikan
5.	Kegiatan: Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2. Kegiatan Penyuluhan Hukum Kepada masyarakat							
6.	Subkegiatan: Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	- Jumlah peserta : 840 orang/tahun (420 orang perempuan, 420 orang laki-laki)							
7.	Tujuan Sub Kegiatan: Meningkatkan keterlibatan peserta perempuan dalam penyuluhan hukum	- Narasumber: 57 orang/tahun (15 orang perempuan, 32 orang laki-laki)							
8.	Sasaran: Perwakilan pada masyarakat dalam kecamatan yang menjadi sasaran kegiatan	- Wilayah: 15 kecamatan/tahun Dari jumlah diatas dibagi menjadi 15 kali kegiatan/tahun							

**GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) TA. 2023
POGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

PERANGKAT DAERAH	Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
TAHUN ANGGARAN	2023
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ TUJUAN SUB KEGIATAN/ INDIKATOR/ SASARAN	Program : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
	Sub Kegiatan : Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
	Tujuan : Meningkatkan keterlibatan peserta perempuan dalam penyuluhan hukum
	Indikator Subkegiatan : Kegiatan penyuluhan hukum yang terlaksana dengan baik
	Sasaran : Perwakilan masyarakat dalam kecamatan yang menjadi sasaran kegiatan
KODE SUB KEGIATAN	5.1.02.01.01.0052
ANALISIS SITUASI	<p>Data Pembuka Wawasan Dasar Hukum: 1. Perda No.2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab.Blitar 2021-2026 2. Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah</p> <p>Kegiatan Penyuluhan Hukum Kepada masyarakat - Jumlah peserta : 840 orang/tahun (420 orang perempuan, 1420 orang laki-laki) - Narasumber :57 orang/tahun (15 orang perempuan, 32 orang laki-laki) - Wilayah : 15 kecamatan/tahun Dari jumlah diatas dibagi menjadi 15 kali kegiatan/tahun</p> <p>Faktor Kesenjangan Gender 1. Akses: - 2. Partisipasi: Peserta perempuan yang aktif dalam kegiatan masyarakat 3. Kontrol: - 4. Manfaat: meningkatnya jumlah peserta perempuan</p> <p>Kesenjangan Gender • Internal: - • Eksternal: Minimnya jumlah narasumber perempuan dibandingkan dengan laki-laki</p>
CAPAIAN SUB KEGIATAN	Tolak Ukur: Meningkatnya jumlah partisipasi peserta perempuan dalam mendukung kegiatan penyuluhan hukum di masyarakat
	Indikator dan Target Kinerja • Output Subkegiatan: Penyuluhan hukum kepada masyarakat terlaksana dengan baik

	<ul style="list-style-type: none"> • Outcome Subkegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat - Jumlah Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum melalui sub kegiatan Penyuluhan Hukum yaitu 6 materi - Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran - Presentase kegiatan Penyuluhan Hukum yang telah dilakukan sebesar 100% 	
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN	Rp 488.326.750	
RENCANA AKSI	Aktivitas Seksi	Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat
	Masukan/ Input	Rp 488.326.750
	Keluaran/ Ouput	Jumlah penyuluhan hukum sebanyak 15 kali di Kecamatan Kabupaten Blitar dengan total 840 orang peserta
	Hasil/ Outcome	Tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum dengan memberikan kuis atau survei pada peserta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum, untuk melihat sejauh mana peserta memahami materi yang telah disampaikan

**TERM OF REFERENCE (TOR) APBD TA. 2022
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

Nama OPD : Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
TAHUN : 2023

1.	PROGRAM		Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2.	SASARAN PROGRAM		Perwakilan pada masyarakat dalam kecamatan yang menjadi sasaran kegiatan
3.	KEGIATAN		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
4.	SUB KEGIATAN		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
5.	LATAR BELAKANG	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> Perda No. 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab Blitar Tahun 2021-2026 Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
		GAMBARAN UMUM	<p>Kegiatan Penyuluhan Hukum Kepada masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta: 200 orang/tahun (75 orang perempuan, 25 orang laki-laki) - Narasumber: 6 orang/tahun, 3 orang perempuan, 3 orang laki-laki) - Wilayah: 4 kecamatan/tahun <p>Dari jumlah diatas dibagi menjadi 4 kali kegiatan/tahun</p> <p>Akses: -</p> <p>Partisipasi: Peserta perempuan kurang aktif dalam kegiatan masyarakat</p> <p>Kontrol: -</p> <p>Manfaat: Meningkatnya jumlah peserta perempuan pada penyuluhan</p> <p>Minimnya jumlah perempuan yang aktif dalam kegiatan masyarakat dibandingkan dengan laki-laki</p>
6.	AKTIVITAS	URAIAN AKTIVITAS	Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat Kabupaten Blitar
		INDIKATOR KINERJA	Melaksanakan Penyuluhan dan Sosialisasi Produk Hukum Kabupaten Blitar
		BATASAN SUB KEGIATAN	Melaksanakan Penyuluhan dan Sosialisasi Produk Hukum pada 4 Kecamatan di Kabupaten Blitar pada Tahun Anggaran 2023
7.	MAKSUD DAN TUJUAN		Meningkatnya jumlah partisipasi peserta perempuan dalam mendukung kegiatan penyuluhan hukum di masyarakat

8.	CARA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN	Swakelola
9.	WAKTU, TEMPAT PELAKSANAAN DAN STRATEGI INTEGRASI GENDER PER AKTIVITAS	Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat
		Integrasi Gender : Undangan peserta penyuluhan hukum mempertimbangkan gender
		Anggaran : Rp 488.326.750
		Tempat : Kecamatan di Kabupaten Blitar
		Waktu : Triwulan I-IV
		Peserta : Masyarakat
		Pelaksana : Sub Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Kabupaten Blitar
10.	PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUBKEGIATAN	Kepala Bagian Hukum
11.	JADWAL	Januari - Desember 2023
12.	BIAYA	Rp 488.326.750

Blitar, 23 Pebruari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLITAR,



[Handwritten Signature]

Drs. IZUL MAROM, M.Sc.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650603 199002 1 002

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN 2023
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**

No.	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data PembukaWawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
			Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan Subkegiatan	Rencana Aksi	Database (Base-line)	Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Visi Bupati Blitar: Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Baladun, Thoyyibatun, Warobbun Ghoffur)	1. Dasar Hukum: - Perda No 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab Blitar Tahun 2021-2026. - Kepmendagri No. 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	Akses: Proses rekrutmen dan lelang jabatan pegawai pada BUMD terbuka dan transparan Partisipasi: Perempuan dan penyandang disabilitas yang direkrut sebagai pegawai pada BUMD maupun yang mengikuti lelang jabatan Kontrol: -	<ul style="list-style-type: none"> Jabatan strategis pada perusahaan/ BUMD lebih dominan dijabat oleh laki-laki Persepsi bahwa laki-laki lebih mampu menguasai pekerjaan (terutama pekerjaan lapangan) dibandingkan perempuan 	Belum menerapkan kebijakan yang responsive gender saat perekrutan pegawai BUMD	Optimalisasi pengelolaan BUMD dengan menerapkan kebijakan yang responsive gender sehingga dapat memberikan kesempatan yang sama baik bagi laki-laki maupun perempuan	Proses rekrutmen melalui Panitia Seleksi Calon Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi sehingga dapat memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki maupun perempuan yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan strategis di perusahaan	Cakupan: Jumlah pegawai BUMD Tahun 2021 1. PDAM Kabupaten Blitar dengan jumlah pegawai 104 orang, terdiri dari laki-laki 75 orang dan perempuan 29 orang 2. PT BPR Hambangan Artha Selaras dengan jumlah pegawai 39 orang, terdiri dari laki-laki 22 orang dan perempuan 17 orang 3. Perusahaan Daerah Savitri Indah dengan jumlah	Outcome (Indikator Program): Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program Perekonomian dan Pembangunan Output (Indikator Kegiatan): Jumlah dokumen kebijakan perekonomian yang tersusun Output (Indikator Subkegiatan): Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
2.	Mendukung Misi 3 RPJMD: Pengoptimalan Kinerja Pemerintah Yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas								
3.	Kebijakan: Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kinerja penyelenggara urusan lingkup koordinasi dan kebijakan pembangunan								



No.	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data PembukaWawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
			Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan Subkegiatan	Rencana Aksi	Database (Base-line)	Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.	Program: Perekonomian dan pembangunan	Membawahi 3 Badan Usaha Milik Daerah:	yang sama untuk menjadi pegawai BUMD dan menduduki jabatan strategis perusahaan.					pegawai 14 orang, terdiri dari laki-laki 6 orang dan perempuan 8 orang.	Indikator Kinerja Aktifitas: Rekrutmen Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi BUMD yang responsif gender
5.	Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1. PDAM Kabupaten Blitar dengan jumlah pegawai 104 orang, terdiri dari laki-laki 75 orang dan perempuan 29 orang							
6.	Subkegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2. PT BPR Hambangun Artha Selaras dengan jumlah pegawai 39 orang, terdiri dari laki-laki 22 orang dan perempuan 17 orang							
7.	Tujuan Sub Kegiatan: Optimalisasi pengelolaan BUMD	3. Perusahaan Daerah Savitri Indah dengan jumlah pegawai 14 orang, terdiri dari laki-laki 6 orang dan perempuan 8 orang.							
8.	Sasaran: Masyarakat Kabupaten Blitar								

**GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) TA. 2023
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**

PERANGKAT DAERAH	Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
TAHUN ANGGARAN	2023
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ TUJUAN SUBKEGIATAN/ INDIKATOR/ SASARAN	Program : Perekonomian dan pembangunan
	Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
	Tujuan : Optimalisasi pengelolaan BUMD
	Indikator Subkegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
	Sasaran : Masyarakat Kabupaten Blitar
KODE SUB KEGIATAN	4.01.03.2.01.01
ANALISIS SITUASI	<p>Data Pembuka Wawasan: Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perda No.2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab.Blitar 2021-2026 2. Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah <p>Membawahi 3 Badan Usaha Milik Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PDAM Kabupaten Blitar dengan jumlah pegawai 104 orang, terdiri dari laki-laki 75 orang dan perempuan 29 orang 2. PT BPR Hambangan Artha Selaras dengan jumlah pegawai 39 orang, terdiri dari laki-laki 22 orang dan perempuan 17 orang 3. Perusahaan Daerah Savitri Indah dengan jumlah pegawai 14 orang, terdiri dari laki-laki 6 orang dan perempuan 8 orang. <p>Faktor Kesenjangan Gender:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akses: Proses rekrut mendan lelang jabatan pegawai pada BUMD terbuka dan transparan 2. Partisipasi: Perempuan dan penyandang disabilitas yang direkrut sebagai pegawai pada BUMD maupun yang mengikuti lelang jabatan 3. Kontrol: - 4. Manfaat: Setiap orang yang memenuhi persyaratan, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai BUMD dan menduduki jabatan strategis perusahaan.

	Sebab Kesenjangan Gender: <ul style="list-style-type: none"> • Internal: <ul style="list-style-type: none"> - Jabatan strategis pada perusahaan/ BUMD lebih dominan dijabat oleh laki-laki - Persepsi bahwa laki-laki lebih mampu menguasai pekerjaan (terutama pekerjaan lapangan) dibandingkan perempuan • Eksternal: Belum menerapkan kebijakan yang responsive gender saat perekrutan pegawai BUMD 	
CAPAIAN SUB KEGIATAN	Tolak Ukur : Tujuan Subkegiatan yang telah direformasi Optimalisasi pengelolaan BUMD dengan menerapkan kebijakan yang responsive gender sehingga dapat memberikan kesempatan yang sama baik bagi laki-laki maupun perempuan	
	Indikator dan Target Kinerja <ul style="list-style-type: none"> • Output Subkegiatan: Jumlah dokumen kebijakan perekonomian yang tersusun • Outcome Subkegiatan: Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program Perekonomian dan Pembangunan 	
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN	Rp 583.878.000	
RENCANA AKSI	Aktivitas Seksi	Proses Rekrutmen melalui Panitia Seleksi Calon Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi
	Masukan/ Input	Rp 200.000.000
	Keluaran/ Output	Adanya kesempatan yang sama bagi laki-laki maupun perempuan yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan strategis di perusahaan
	Hasil/ Outcome	Rekrutmen Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi BUMD yang responsif gender

**TERM OF REFERENCE (TOR) APBD TA. 2023
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**

Nama OPD : Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
Tahun : 2023

1.	PROGRAM		Perekonomian dan Pembangunan
2.	SASARAN PROGRAM		Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program Perekonomian dan Pembangunan
3.	KEGIATAN		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
4.	SUB KEGIATAN		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
5.	LATAR BELAKANG	DASAR HUKUM	<p>1. Perda No. 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab Blitar Tahun 2021-2026</p> <p>2. Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah</p>
		GAMBARAN UMUM	<p>Membawahi 3 Badan Usaha Milik Daerah:</p> <p>1. PDAM Kabupaten Blitar dengan jumlah pegawai 104 orang, terdiri dari laki-laki 75 orang dan perempuan 29 orang</p> <p>2. PT BPR Hambangan Artha Selaras dengan jumlah pegawai 39 orang, terdiri dari laki-laki 22 orang dan perempuan 17 orang</p> <p>3. Perusahaan Daerah Savitri Indah dengan jumlah pegawai 14 orang, terdiri dari laki-laki 6 orang dan perempuan 8 orang.</p> <p>Akses: Proses rekrut mendan lelang jabatan pegawai pada BUMD terbuka dan transparan</p> <p>Partisipasi: Perempuan dan penyandang disabilitas yang direkrut sebagai pegawai pada BUMD maupun yang mengikuti lelang jabatan</p> <p>Kontrol: -</p> <p>Manfaat: Setiap orang yang memenuhi persyaratan, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai BUMD dan menduduki jabatan strategis perusahaan.</p>
6.	AKTIVITAS	URAIAN AKTIVITAS	Proses rekrutmen melalui Panitia Seleksi Calon Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi BUMD Kabupaten Blitar yaitu Perusahaan Daerah Savitri Indah dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Blitar

		INDIKATOR KINERJA	Indikator Subkegiatan: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Target Kinerja: Rekrutmen Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi BUMD yang responsif gender
		BATASAN SUB KEGIATAN	Seleksi Calon Komisaris/ Dewan Pengawas dan Direksi BUMD Kabupaten Blitar yaitu Perusahaan Daerah Savitri Indah dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Blitar
7.	MAKSUD DAN TUJUAN		Optimalisasi pengelolaan BUMD dengan menerapkan kebijakan yang responsive gender sehingga dapat memberikan kesempatan yang sama baik bagi laki-laki maupun perempuan
8.	CARA PELAKSANAAN SUBKEGIATAN		Swakelola
9.	WAKTU, TEMPAT PELAKSANAAN DAN STRATEGI INTEGRASI GENDER PER AKTIVITAS		Proses Rekrutmen melalui Panitia Seleksi Calon Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi Integrasi Gender : Menerima pendaftaran dengan mempertimbangkan keseimbangan gender Anggaran : Rp 200.000.000 Tempat : Kabupaten Blitar Waktu : Triwulan II dan Triwulan III Peserta : Masyarakat Kabupaten Blitar Pelaksana : Bagian Perekonomian Aktivitas Pendukung : Rp 383.878.000
10.	PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN		Kepala Bagian Perekonomian
11.	JADWAL		Januari - Desember 2023
12.	BIAYA		Rp 583.878.000

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN ANGGARAN 2023
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**

No.	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
			Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Database (Base-line)	Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Visi Bupati Blitar: Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Baladun, Thoyyibatun, Warobbun Ghoffur)	1. Dasar Hukum: - Perda No.2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab.Blitar 2021-2026 - Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan	Akses: Selama ini pelaksana monev di Bagian Administrasi Pembangunan masih diikuti oleh tenaga ASN laki-laki untuk titik pembangunan dengan akses jalan yang sulit. Partisipasi: Selama ini yang memiliki kemampuan untuk melakukan monev mayoritas tenaga ASN Laki-laki Kontrol : -	<ul style="list-style-type: none"> • ASN di Bagian Administrasi Pembangunan mayoritas adalah laki-laki • Keterbatasan kendaraan operasional yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya ASN yang membidangi kegiatan Monev (ASN lulusan Sarjana Teknik Sipil) • Selama ini yang mampu mengikuti kegiatan monev pembangunan hanya ASN laki-laki dan THL yang notabene lulusan Teknik Sipil 	Adanya peran ASN perempuan di Bagian Administrasi Pembangunan dalam setiap kegiatan Monev Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembekalan kepada ASN Perempuan yang ada di Bagian Administrasi Pembangunan terkait kegiatan monev pembangunan 2. Pengadaan ASN yang membidangi (ASN dengan Sarjana Teknik Sipil) 3. Permohonan pengadaan kendaraan operasional untuk mendukung kegiatan monev di wilayah dengan akses jalan yang sulit dilalui 	Data jumlah ASN dan Non ASN di Bagian Administrasi Pembangunan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Laki-laki sejumlah 5 orang (ASN 4 orang dan THL 1 orang) 2. Perempuan sejumlah 3 orang ASN 	Output (Indikator Program): Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada Prgram Perekonomian dan Pembangunan (100%) Output (Indikator Kegiatan): Persentase pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan (100%) Output (Indikator Subkegiatan): Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan
2.	Mendukung Misi 3 RPJMD: Pengoptimalan Kinerja Pemerintah Yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas								
3.	Kebijakan: Meningkatnya kinerja Penyelenggara urusan bidang koordinasi bidang administrasi								
4.	Program: Perekonomian Dan Pembangunan								

No.	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
			Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Database (Base-line)	Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5.	Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pembangunan dan Keuangan Daerah	Manfaat : Peranan dari kegiatan monev pembangunan ini masih dirasakan oleh ASN Laki-laki saja.						Pembangunan (1 dokumen laporan)
6.	Subkegiatan: Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2. Jumlah ASN di Bagian Administrasi Pembangunan: • Laki-laki ada 5 orang • Perempuan ada 3 orang							Indikator Kinerja Aktivitas: • ASN Perempuan di Bagian Administrasi Pembangunan mampu mengikuti monev pembangunan fisik
7.	Tujuan Subkegiatan: Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Penyelenggara UrusanLingkup Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan	3. Jumlah Non ASN (THL) di Bagian Administrasi Pembangunan: • Laki-laki ada 1 orang • Perempuan 0							• Tersedianya ASN yang membidangi kegiatan monev • Tersedianya kendaraan monev yang memadai
8.	Sasaran: ASN di Bagian Administrasi Pembangunan	4. Kegiatan Monev dilakukan pada pembangunan fisik di Wilayah Kabupaten Blitar yang terkadang sulit dijangkau							

**GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) TA. 2023
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**

PERANGKAT DAERAH	Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
TAHUN ANGGARAN	2023
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ TUJUAN SUBKEGIATAN/ INDIKATOR/ SASARAN	Program : Perekonomian Dan Pembangunan
	Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
	Subkegiatan : Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
	Tujuan : Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan di Lingkup Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan
	Indikator Subkegiatan : Jumlah Dokumen Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
	Sasaran : ASN di Bagian Administrasi Pembangunan
KODE SUB KEGIATAN	4.01.03.2.02.003
ANALISIS SITUASI	<p>Data Pembuka Wawasan: Dasar Hukum: 1. Perda No.2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab.Blitar 2021-2026 2. Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah</p> <p>Jumlah ASN di Bagian Administrasi Pembangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laki-laki ada 5 orang • Perempuan ada 3 orang <p>Jumlah Non ASN (THL) di Bagian Administrasi Pembangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laki-laki ada 1 orang • Perempuan 0 <p>Kegiatan Monev dilakukan pada pembangunan fisik di Wilayah Kabupaten Blitar yang terkadang sulit dijangkau</p> <p>Faktor Kesenjangan Gender:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akses: Selama ini pelaksana monev di Bagian Administrasi Pembangunan masih diikuti oleh tenaga ASN laki-laki untuk titik pembangunan dengan akses jalan yang sulit. 2. Partisipasi: Selama ini yang memiliki kemampuan untuk melakukan monev mayoritas tenaga ASN Laki-laki 3. Kontrol: - 4. Manfaat: Peranan dari kegiatan monev pembangunan ini masih dirasakan oleh ASN Laki-laki

	Sebab Kesenjangan Gender: <ul style="list-style-type: none"> • Internal: <ul style="list-style-type: none"> - ASN di Bagian Administrasi Pembangunan mayoritas adalah laki-laki - Keterbatasan kendaraan operasional yang memadai • Eksternal: <ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedianya ASN yang membidangi kegiatan Monev (ASN lulusan Sarjana Teknik Sipil) - Selama ini yang mampu mengikuti kegiatan monev pembangunan hanya ASN laki-laki dan THL yang notabene lulusan Teknik Sipil 	
CAPAIAN SUB KEGIATAN	Tolak Ukur : Tujuan Subkegiatan yang telah direformasi Adanya peran ASN perempuan di Bagian Administrasi Pembangunan dalam setiap kegiatan Monev Pembangunan	
	Indikator dan Target Kinerja <ul style="list-style-type: none"> • Output Subkegiatan: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (1 dokumen laporan) • Outcome Subkegiatan: Tersedianya ASN yang membidangi kegiatan monev dan ASN Perempuan di Bagian Administrasi Pembangunan mampu mengikuti monev pembangunan fisik 	
JUMLAH ANGGARAN SUBKEGIATAN	Rp 159.599.000	
RENCANA AKSI	Aktivitas Seksi	Monitoring Evaluasi Pembangunan Fisik di Kabupaten Blitar
	Masukan/ Input	Rp. 159.599.000
	Keluaran/ Ouput	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan fisik di Kabupaten Blitar
	Hasil/ Outcome	Terlibatnya ASN perempuan dalam monitoring dan evaluasi pekerjaan fisik di Kabupaten Blitar

**TERM OF REFERENCE (TOR) APBD TA. 2023
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**

Nama OPD : Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
Tahun : 2023

1.	PROGRAM		Perekonomian Dan Pembangunan
2.	SASARAN PROGRAM		Persentase pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan (100%)
3.	KEGIATAN		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
4.	SUB KEGIATAN		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
5.	LATAR BELAKANG	DASAR HUKUM	<p>1. Perda No. 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab Blitar Tahun 2021-2026</p> <p>2. Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah</p>
		GAMBARAN UMUM	<p>Jumlah ASN di Bagian Administrasi Pembangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laki-laki ada 5 orang • Perempuan ada 3 orang <p>Jumlah Non ASN (THL) di Bagian Administrasi Pembangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laki-laki ada 1 orang • Perempuan 0 <p>Kegiatan Monev dilakukan pada pembangunan fisik di Wilayah Kabupaten Blitar yang terkadang sulit dijangkau</p> <p>Akses: Selama ini pelaksana monev di Bagian Administrasi Pembangunan masih diikuti oleh tenaga ASN laki-laki untuk titik pembangunandengan akses jalan yang sulit.</p> <p>Partisipasi: Selama ini yang memiliki kemampuan untuk melakukan monev mayoritas tenaga ASN Laki-laki</p> <p>Kontrol : -</p> <p>Manfaat : Peranan dari kegiatan monev pembangunan ini masih dirasakan oleh ASN Laki-laki saja.</p>
6.	AKTIVITAS	URAIAN AKTIVITAS	<p>1. Menentukan titik-titik lokasi monev dengan dasar data dari OPD-OPD yang menjalankan aktivitas pembangunan fisik</p> <p>2. Melakukan koordinasi dengan TIM Monev rekanan untuk meminta pendampingan saat monev di beberapa titik</p>

			<p>3. Membekali ASN dan Non ASN di Bagian Administrasi Pembangunan terkait SOP Monev</p> <p>4. Meninjau lokasi monev baik dengan didampingi TIM Monev rekanan maupun monev dari Bagian Administrasi Pembangunan</p> <p>5. Menyajikan informasi dari kegiatan monev yang telah dilakukan dalam bentuk laporan</p> <p>6. Mencocokkan dan membandingkan antara laporan dari rekanan tim monev dengan laporan dari bagian administrasi pembangunan</p> <p>7. Laporan yang disajikan oleh tim monev rekanan dijadikan sebagai indikator/output dari sub kegiatan dan laporan dari rekan bagian Administrasi Pembangunan dijadikan bahan penyusunan surat pertanggungjawaban.</p>
		INDIKATOR KINERJA	<p>Indikator Subkegiatan: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan</p> <p>Target Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perempuan di Bagian Administrasi Pembangunan mampu mengikuti monev pembangunan fisik • Tersedianya ASN yang membidangi kegiatan monev • Tersedianya kendaraan monev yang memadai
		BATASAN SUB KEGIATAN	Assesment Lapangan
7.	MAKSUD DAN TUJUAN		Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan di Lingkup Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan
8.	CARA PELAKSANAAN SUBKEGIATAN		Swakelola
9.	WAKTU, TEMPAT PELAKSANAAN DAN STRATEGI INTEGRASI GENDER PER AKTIVITAS		<p>Monitoring Evaluasi Pembangunan Fisik di Kabupaten Blitar</p> <p>Integrasi Gender : Petugas monev pembangunan fisik mempertimbangkan keseimbangan gender</p> <p>Anggaran : Rp. 159.599.000</p> <p>Tempat : Wiayah Kabupaten Blitar</p> <p>Waktu : Triwulan I-IV</p> <p>Peserta : ASN dan non ASN (THL) Bagian Administrasi Pembangunan</p> <p>Pelaksana : Bagian Administrasi Pembangunan</p>
10.	PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN		Kepala Bagian Bagian Administrasi Pembangunan
11.	JADWAL		Januari - Desember 2023
12.	BIAYA		Rp. 159.599.000

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN ANGGARAN 2023
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**

No.	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
			Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Database (Base-line)	Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Visi Bupati Blitar: Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Baladun, Thoyyibatun, Warobbun Ghoffur)	1. Dasar Hukum: - Perda No 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab Blitar Tahun 2021-2026. - Kepmendagri No. 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan	Akses : Tugas utama dalam melaksanakan tujuan organisasi dilakukan secara bersama baik personel Laki-laki ataupun perempuan dalm satu kegiatan sehingga memunculkan manfaat bagi seluruh elemen tanpa adanya perbedaan jenis kelamin Partisipasi : Jumlah Laki-laki lebih banyak sehingga tugas kegiatan pendampingan dan fasilitasi OPD/SKPD lebih banyak peran laki-laki.	Personel yang ditugaskan dalam pendampingan pengadaan kebanyakan laki-laki dikarenakan jumlah personel laki-laki lebih banyak dari jumlah perempuan	Tidak terdapat faktor kesenjangan Eksternal	Pendampingan dan advokasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa, baik bagi OPD/SKPD atau penyedia dilaksanakan dengan dasar pembentukan tim pendamping proporsi jumlah staf laki-laki dan perempuan dalam satu tim secara imbang yang akhirnya membentuk responsif gender.	1. Mengadakan Bimbingan Teknis terkait tugas pokok dan fungsi PBJ agar meningkatkan kompetensi SDM PBJ pada tingkatan sama 2. Memasukkan indeks pengadaan barang dan jasa dalam sasaran pembangunan daerah 3. Melaksanakan pendampingan pada penyedia untuk meningkatkan kualitas serta kefahaman pada setiap proses yang diluncurkan	- Pembentukan tim pendamping dari staf PBJ dengan memperhitug kan jumlah personel sehingga dalam satu tim dapat seimbang dan memiliki tupoksi yang sama - Pelaksanaan pendampingan terhadap OPD/SKPD dalam pelaksanaan proses pengadaan pada semua tahapan	Outcome (Indikator Program): Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada Program Perekonomian dan Pembangunan (100%) Output (Indikator Kegiatan): Meningkatkan kinerja kegiatan pada Program Pembinaan dan advokasi. Output (Indikator Subkegiatan): Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barano dan iasa
2.	Mendukung Misi 3 RPJMD: Pengoptimalan Kinerja Pemerintah Yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas								
3.	Kebijakan: Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kinerja penyelenggara urusan lingkup koordinasi dan kebijakan pembangunan								

No.	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9	
	Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil		
			Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Database (Base-line)	Indikator Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
4.	Program: Perekonomian dan pembangunan	dan Keuangan Daerah	Kontrol : Dalam Proses Peningkatan Kompetensi SDM PBJ Wanita lebih teliti dan turut aktif terkait kegiatan bimbingan teknis materi PBJ. Manfaat : Pendampingan terhadap OPD/SKPD memberikan dampak pengetahuan pada personel OPD/SKPD tersebut dalam melaksanakan tujuan organisasi mereka						86 orang	
5.	Kegiatan: Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2. Fasilitasi dan pendampingan terhadap OPD/SKPD atau penyedia								Indikator Kinerja Aktifitas: - ASN laki-laki dan perempuan lebih turut aktif dalam peningkatan kompetensi SDM PBJ. - ASN di bagian Pengadaan Barang dan jasa mengikut bimbingan dan pendampingan kompetensi SDM
6.	Subkegiatan: Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	3. Pembinaan terhadap staff PBJ dalam meningkatkan kapasitas SDM PBJ								
7.	Tujuan Subkegiatan: Pendampingan dan advokasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa, baik bagi OPD/SKPD atau penyedia.	4. Jumlah karyawan total 25 Dengan rincian: Laki-laki = 15 Perempuan = 10								
8.	Sasaran : Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, PPK	5. Persentase perempuan yang ditugaskan dalam pendampingan pengadaan barang/jasa di OPD/SKPD sudah proporsional jika dibandingkan Jumlah personel BPBJ (15 laki-laki dan 8 perempuan)								

**GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) TA. 2023
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**

PERANGKAT DAERAH	Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
TAHUN ANGGARAN	2023
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ TUJUAN SUBKEGIATAN/ INDIKATOR/ SASARAN	Program : Perekonomian dan pembangunan
	Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
	Tujuan : Pendampingan dan advokasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa, baik bagi OPD/SKPD atau Penyedia Jasa
	Indikator Subkegiatan : Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa
	Sasaran : Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, PPK, Penyedia Jasa
KODE SUB KEGIATAN	4.01.03.2.03.03
ANALISIS SITUASI	<p>Data Pembuka Wawasan: Dasar Hukum: 1. Perda No.2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab.Blitar 2021-2026 2. Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah</p> <p>Jumlah ASN dan Non ASN (THL) di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa: laki-laki ada 15 orang dan perempuan ada 10 orang</p> <p>Persentase perempuan yang ditugaskan dalam pendampingan pengadaan barang dan jasa di OPD/SKPD sudah proporsional jika dibandingkan Jumlah personil BPBJ (15 laki-laki dan 10 perempuan)</p> <p>Faktor Kesenjangan Gender: 1. Akses: Tugas utama dalam melaksanakan tujuan organisasi dilakukan secara bersama baik personel Laki-laki ataupun perempuan dalam satu kegiatan sehingga memunculkan manfaat bagi seluruh elemen tanpa adanya perbedaan jenis kelamin 2. Partisipasi: Jumlah Laki-laki lebih banyak sehingga tugas kegiatan pendampingan dan fasilitasi OPD/SKPD lebih banyak peran laki-laki. 3. Kontrol: Dalam Proses Peningkatan Kompetensi SDM PBJ Perempuan lebih teliti dan turut aktif terkait kegiatan bimbingan teknis materi PBJ.</p>

	<p>4. Manfaat: Pendampingan terhadap OPD/SKPD memberikan dampak pengetahuan pada personel OPD/SKPD tersebut dalam melaksanakan tujuan organisasi mereka</p> <p>Sebab Kesenjangan Gender:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internal: ASN di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sudah proporsional jumlahnya • Eksternal: Tidak terdapat faktor kesenjangan Eksternal 	
<p>CAPAIAN SUB KEGIATAN</p>	<p>Tolak Ukur : Tujuan Subkegiatan yang telah direformasi Pendampingan dan advokasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa, baik bagi OPD/SKPD atau penyedia dilaksanakan dengan dasar pembentukan tim pendamping proporsi jumlah staf laki-laki dan perempuan dalam satu tim secara imbang yang akhirnya membentuk responsif gender.</p>	
	<p>Indikator dan Target Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Output Subkegiatan: Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa 86 orang • Outcome Subkegiatan: Presentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada Prgram Perekonomian dan Pembangunan (100%) 	
<p>JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN</p>	<p>Rp 423.538.000</p>	
<p>RENCANA AKSI</p>	<p>Aktivitas Seksi</p>	<p>Bimbingan Teknis Terkait Tugas Pokok dan Fungsi PBJ</p>
	<p>Masukan/ Input</p>	<p>Rp 11.450.000</p>
	<p>Keluaran/ Ouput</p>	<p>- ASN laki-laki dan perempuan lebih turut aktif dalam peningkatan kompetensi SDM PBJ - ASN di bagian Pengadaan Barang dan jasa mengikut bimbingan dan pendampingan kompetensi SDM</p>
	<p>Hasil/ Outcome</p>	<p>Jumlah orang yang mengkuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa 86 orang</p>

**TERM OF REFERENCE (TOR) APBD TA. 2023
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**

Nama OPD : Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
Tahun : 2023

1.	PROGRAM	Perekonomian dan Pembangunan
2.	SASARAN PROGRAM	Presentase tingkat capaian kinerja pada program perekonomian dan pembangunan
3.	KEGIATAN	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
4.	SUB KEGIATAN	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang
5.	LATAR BELAKANG	<p>1. Perda No. 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab Blitar Tahun 2021-2026</p> <p>2. Keputusan Mendagri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah</p>
	DASAR HUKUM	
	GAMBARAN UMUM	<p>Fasilitasi dan pendampingan terhadap OPD/SKPD atau penyedia</p> <p>Pembinaan terhadap staff PBJ dalam meningkatkan kapasitas SDM PBJ</p> <p>Jumlah karyawan total 25 Dengan rincian : Laki-laki = 15 Perempuan = 10</p> <p>Persentase perempuan yang ditugaskan dalam pendampingan pengadaan barang /jasa di OPD/SKPD sudah proporsional jika dibandingkan Jumlah personel BPBJ (15 laki-laki dan 8 perempuan)</p> <p>Akses : Tugas utama dalam melaksanakan tujuan organisasi dilakukan secara bersama baik personel Laki-laki ataupun perempuan dalm satu kegiatan sehingga memunculkan manfaat bagi seluruh elemen tanpa adanya perbedaan jenis kelamin</p> <p>Partisipasi : Jumlah Laki-laki lebih banyak sehingga tugas kegiatan pendampingan dan fasilitasi OPD/SKPD lebih banyak peran laki-laki.</p> <p>Kontrol : Dalam Proses Peningkatan Kompetensi SDM PBJ Wanita lebih teliti dan turut aktif terkait kegiatan bimbingan teknis materi PBJ.</p>

			Manfaat : Pendampingan terhadap OPD/SKPD memberikan dampak pengetahuan pada personel OPD/SKPD tersebut dalam melaksanakan tujuan organisasi mereka
6.	AKTIVITAS	URAIAN AKTIVITAS	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
		INDIKATOR KINERJA	<p>Indikator Subkegiatan: Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa sebanyak 86 orang</p> <p>Target Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> ASN laki-laki dan perempuan lebih turut aktif dalam peningkatan kompetensi SDM PBJ sebagai bentuk pemenuhan tugas pokok dan fungsi organisasi Dalam pemenuhan kebutuhan pengembangan SDM PBJ, setiap ASN PBJ memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kegiatan bimbingan teknis maupun pendampingan kompetensi
		BATASAN SUB KEGIATAN	<ol style="list-style-type: none"> Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM PBJ dan Pelaku PBJ lain FGD menyamakan persepsi antar personil PBJ dan Pelaku PBJ lain Seminar atau Webinar Pengelolaan dan Pemanfaatan Aplikasi Baru PBJ
7.	MAKSUD DAN TUJUAN		Meningkatnya capaian kinerja kegiatan pada program perekonomian dan pembangunan
8.	CARA PELAKSANAAN SUBKEGIATAN		Swakelola
9.	WAKTU, TEMPAT PELAKSANAAN DAN STRATEGI INTEGRASI GENDER PER AKTIVITAS		1. Pendampingan Pengisian RUP
			Integrasi Gender : Undangan peserta pendampingan pengisian RUP mempertimbangkan keseimbangan gender
			Anggaran : Rp. 10.000.000
			Tempat : Ruang Rapat Candi Penataran Kantor Sekretariat Daerah Kab. Blitar
			Waktu : Triwulan I dan IV
			Peserta : Seluruh Kepala OPD se Kabupaten Blitar
		Pelaksana : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

		2. FGD Implementasi Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Blitar
		Integrasi Gender : Undangan peserta FGD mempertimbangkan keseimbangan gender
		Anggaran : Rp 1.450.000
		Tempat : Pendopo Ronggo Hadi Negoro
		Waktu : Triwulan I
		Peserta : Seluruh Kepala OPD se Kabupaten Blitar
		Pelaksana : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Aktivitas Pendukung : Rp 412.088.000
10.	PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
11.	JADWAL	Januari - Desember 2023
12.	BIAYA	Rp 423.538.000

Blitar, 23 Pebruari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLITAR,



Drs. IZUL MAROM, M.Sc.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650603 199002 1 002